

**STUDI ANALISIS EFEKTIFITAS PEMBERIAN ZAKAT
PRODUKTIF SEBAGAI MODAL USAHA DI BADAN AMIL
ZAKAT DAERAH (BAZDA) KABUPATEN MAGELANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

Dalam Ilmu Syari'ah



Disusun Oleh :

Muhamad Zudi Syarif

2101027

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2008



**DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : **Muhamad Zudi Syarif**
NIM : **2101027**
Jurusan : **Mu'amalah**
Judul : **Studi Analisis Efektifitas Pemberian Zakat Produktif
Sebagai Modal Usaha Di Badan Amil Zakat Daerah
(BAZDA) Kabupaten Magelang**

Telah dimunaqasyahkan pada Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / Baik / Cukup, pada tanggal:

31 Juli 2008

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) tahun akademik 2007/2008.

Semarang, 11 Agustus 2008

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Drs.H. Hasyim Syarbani, M.M.
NIP. 150 207 762

H. M. Arja Imroni, M.Ag.
NIP. 150 282 133

Penguji I,

Penguji II,

Nur Fathoni, M.Ag.
NIP. 150 299 490

Drs. H. Abdul Fatah Idris, M.S.I
NIP. 150 216 494

Pembimbing I,

Pembimbing II,

H. M. Arja Imroni, M.Ag.
NIP. 150 282 133

Achmad Arief Budiman. M.Ag.
NIP. 150 274 615

MOTTO

~ ❦❦❦❦❦❦❦❦ ~

❦ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ❦

“ Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya ¹“

~ ❦❦❦❦❦❦❦❦ ~

” Tak ada yang sempurna di dunia ini, akan tetapi tak ada sesuatu pun yang tak mungkin di dunia ini “

~ ❦❦❦❦❦❦❦❦ ~

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1996, hal. 421

DAFTAR ISI

Halaman Judul	0
Halaman Pengesahan	i
Abstrak	ii
Kata Pengantar	iii
Motto	v
Persembahan	vi
Daftar Isi	vii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	8
	C. Tujuan Penelitian	8
	D. Telaah Pustaka	9
	E. Metode Penelitian	10
	F. Sistematika Penulisan	13
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT	15
	A. Pengertian Zakat	15
	B. Landasan Hukum Zakat	17
	C. Syarat-Syarat Wajib Zakat	20
	D. Klasifikasi Zakat	22
	E. Tujuan Disyariatkannya Zakat	25
	F. Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat (<i>Mustahik</i>)	26

BAB III	EFEKTIFITAS PEMBERIAN ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI MODAL USAHA DI BADAN AMIL ZAKAT DAERAH (BAZDA) KABUPATEN MAGELANG	31
A.	Gambaran Umum Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang	31
1.	Latar Belakang	31
2.	Struktur Kepengurusan BAZDA Kabupaten Magelang	34
3.	Mekanisme Kerja BAZDA Kabupaten Magelang ..	36
4.	Daftar Nama Muzakki (Dinas / Kantor)	38
5.	Perkembangan Perolehan Zakat Amwal dari Tahun 2005-2006	40
6.	Rekapitulasi Distribusi Zakat BAZDA Kabupaten Magelang	41
B.	Praktek Penyaluran Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha	41
1.	Kerangka Dasar Pendayagunaan Zakat Sebagai Modal Usaha Produktif	42
2.	Tujaun dan Manfaat Pendayagunaan Zakat sebagai Modal Usaha Produtif	45
3.	Pola dan Bentuk Pendayagunaan Zakat Sebagai Modal Usaha	46
4.	Sasaran Pendayagunaan Zakat Sebagai Modal Usaha	49
5.	Prosedur Pendayagunaan Zakat Sebagai Modal Usaha	50

BAB IV	STUDI ANALISIS EFEKTIFITAS PEMBERIAN ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI MODAL USAHA DI BADAN AMIL ZAKAT DAERAH (BAZDA) KABUPATEN MAGELANG
	A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembnerian Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang
	B. Analisis Terhadap Efektifitas Pembnerian Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang
BAB V	PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran-Saran
	C. Penutup
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

ABSTRAK

Pada dasarnya zakat hanyalah untuk delapan golongan yang terdapat dalam surat at – Taubah ayat 60 yaitu faqir, miskin, amil, muallaf, orang-orang yang berhutang, sabilillah, ibnu sabil, dan memerdekakan budak.

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang berdiri di bawah naungan Departemen Agama Kabupaten Magelang. Oleh BAZDA pendistribusian zakat mempunyai dua sifat yaitu konsumtif dan produktif. Permasalahannya adalah ketika BAZDA mendistribusikan zakat sebagai modal usaha, padahal secara syar'i penyaluran zakat harus berupa pemindahan hak, dan penggunaan sepenuhnya adalah wewenang penerima (mustahik).

Pokok permasalahannya adalah :

1. Tinjauan hukum Islam terhadap pemberian zakat produktif sebagai modal usaha.
2. Bagaimana tingkat efektifitas pemberian zakat sebagai modal usaha.

Adapun hasil temuan di BAZDA Kabupaten Magelang untuk distribusi zakat konsumtif tidak mengalami kendala. Tetapi untuk zakat produktif sebagai modal usaha mengalami beberapa kendala.

Desain penelitian ini adalah sebuah penelitian lapangan atau *field research* yang bersifat non eksperimen. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptifeksploratif yang dimaksudkan untuk menggambarkan keadaan dan status fenomena dari obyek yang diteliti.

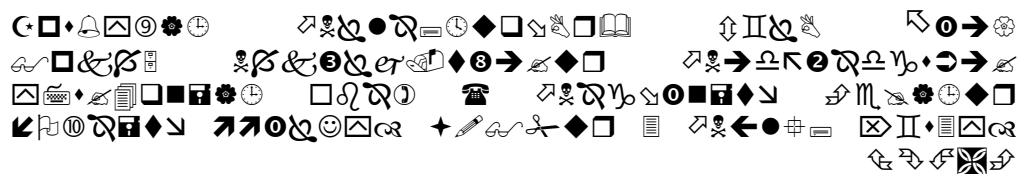
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ide dasar pendayagunaan zakat sebagai modal usaha adalah pemberdayaan mustahik dengan memberi “kail” bukan memberi “ikan”. BAZDA dalam memberikan zakat sebagai modal usaha ternyata belum tercapai tingkat efektifitas yang diharapkan. Penyebab belum tercapainya tingkat efektifitas dikarenakan beberapa factor : pertama yaitu karena kurangnya monitoring dan pembinaan dari BAZDA sendiri terhadap para mustahik. Kedua adanya penyalahgunaan dana zakat oleh para mustahik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah ibadah pokok yang merupakan pertumbuhan dan sekaligus penyucian diri secara teknis. Zakat berarti menyucikan harta milik seseorang dengan cara pendistribusian oleh kaum kaya kepada kaum miskin sebagai hak mereka dan bukan derma.¹ Dengan membayarkan zakat maka seseorang memperoleh penyucian hati dan dirinya telah melakukan tindakan yang benar dan memperoleh rahmat selain hartanya akan bertambah. Sebagaimana dalam firman Allah SWT :



Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S. At-Taubah ; 103)²

Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda serta zakat

¹ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, Bandung: Pustaka Madani, 1998, hal. 35

² Departemen Agama RI, *AlQur'an al-Karim dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1996, hal. 162

itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

Selain itu zakat juga menempati posisi nomor tiga di dalam rukun Islam setelah syahadat dan sholat. Secara sistematis, seseorang apabila menjadi seorang muslim yang pertama dilakukan adalah diwajibkannya membaca dua kalimah syahadat, kemudian melaksanakan sholat sebagai suatu bentuk pengabdian diri seorang muslim kepada Tuhannya (*habluminallah*), kedua rukun ini diwajibkan kepada setiap muslim baik itu kaya maupun miskin. Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu sesama muslim yang lain sebagai wujud kepedulian terhadap sesama muslim (*habluminannas*) yang juga harus diniati dengan rasa tulus ikhlas sebagai bentuk ibadah kepada Tuhannya (*habluminallah*). Jadi zakat adalah suatu bentuk ibadah yang selain berfungsi sebagai suatu ibadah kepada Allah (*vertical*), tetapi juga sebagai perwujudan kepedulian terhadap sesama muslim yang lain (*horizontal*).

Indonesia dengan masyarakat yang 80% beragama Islam memang menyimpan potensi Zakat yang besar. Logikanya, bila 220.953.634 juta jiwa penduduk Indonesia,³ dan dari jumlah tersebut jumlah tersebut 80% beragama Islam. Katakanlah yang membayar zakat 1% saja dari seluruhnya

³ Sumber : Departemen Dalam Negeri RI, *Data Wilayah Administrasi Pemerintahan*. Pdf – [http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar Provinsi Indonesia menurut jumlah penduduk](http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Provinsi_Indonesia_menurut_jumlah_penduduk) – Tanggal 13 Juli 2008

maka bisa dihitung $1/100 \times 80/100 \times 220.953.634$ jiwa = 1.767.629 jiwa. Apabila mereka tiap tahunnya membayar Zakat fitrah Rp.10.000,00 maka uang yang terkumpul sebanyak Rp. 17.676.290.000,00. Dana ini tentu saja akan besar manfaatnya bagi pembangunan manusia seutuhnya terutama untuk memberantas kekufuran, kemiskinan dan keterbelakangan. Belum lagi Zakat harta, perdagangan, profesi, pertanian, dan lain sebagainya.

Angka-angka di atas barulah sekedar asumsi dan potensi yang belum menjadi sebuah kenyataan. Untuk menjadikannya kenyataan, tentu potensi Zakat tersebut harus digali, direspon dan diupayakan oleh pemerintah bersama masyarakat, terutama Badan Pengelola Zakat (BPZ), baik oleh Badan Amil Zakat (BAZ) ataupun Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sebab, apabila hal tersebut tidak digali, direspon dan diupayakan keberadaannya, maka hal itu hanya menjadi potensi tanpa bentuk dan tak akan bermakna apa-apa.

Angka kemiskinan dari hari ke hari di Indonesia grafiknya semakin meningkat. Apalagi, krisis multi dimensi yang melanda bangsa Indonesia dari pertengahan tahun 1997 sampai saat ini belum berakhir. Masalah kemiskinan memang tanggung jawab negara.⁴ Namun dengan melihat kondisi tersebut, potensi dana Zakat yang besar tersebut dapat berperan memnatu pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi.

Zakat juga sebagai faktor yang sangat signifikan dalam proses pengentasan kemiskinan. Dengan zakat akan terwujud keseimbangan dalam

⁴ Pasal 34 UUD 1945

distribusi harta dan kepemilikan, sehingga harta tersebut tidak hanya dikuasai oleh orang-orang kaya saja.⁵ Satu bukti bahwa Zakat belum diberdayakan dengan baik, dapat dilihat dari kondisi masyarakat Islam yang sebagian besar masuk dalam kategori fakir miskin. Bahkan pengambilan dana untuk pembangunan panti asuhan, sekolah serta tempat-tempat ibadah seperti yang ada di perempatan jalan atau di angkutan umum (bus) mayoritas berasal dari umat Islam, dan kenyataan ini ada hampir di seluruh wilayah Nusantara, termasuk di kabupaten Magelang sendiri.

Di Indonesia, pendistribusian zakat selama ini melalui dua kategori, yaitu kategori konsumtif dan produktif.⁶ Sebenarnya bila kita perhatikan keadaan fakir miskin, maka tetap ada Zakat konsumtif bagi mereka yang sudah tidak mampu dalam segala hal, seperti anak-anak yatim yang belum bisa berusaha, orang-orang jompo, orang-orang cacat, sehingga dengan keadaan seperti ini tidak bisa dihindari. Tetapi bagi yang masih kuat dalam bekerja dan mandiri dalam menjalankan usaha baik itu diberikan secara hibah maupun dalam bentuk pinjaman.⁷

Menurut Dawan Raharjo, kategori produktif akan mampu mengantarkan kepada hakekat zakat yang sebenarnya, yakni sebagai ibadah dan juga sebagai dana sosial. Sedangkan dengan pendayagunaan Zakat untuk

⁵ Q.S. Al-Hasyr : 7

⁶ Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002, hal. 133

⁷ M. Ali Hasan, *Zakat Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hal. 23

konsumtif akan cenderung melanggengkan kemiskinan, solusinya kemudian adalah menerapkan konsep Zakat produktif.⁸ Dengan menerapkan konsep seperti ini sehingga zakat dapat memberikan pemecahan yang nyata atas kemiskinan yang masih dialami oleh sebagian masyarakat kita. Kiranya sudah bukan waktunya uang Zakat hanya sebagai uang pengembira, yakni sebagian masyarakat menggunakan dana Zakat secara konsumtif. Zakat disyariatkan jelas agar dapat memecahkan kemiskinan dan bukan untuk memelihara kemiskinan.

Pendayagunaan Zakat produktif sebagai modal usaha merupakan suatu konsep yang dapat diterapkan dalam memberantas kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Bahkan sekarang telah dijalankan oleh BAZ ataupun LAZ. Pokok gagasannya adalah kalau menolong golongan kaum fakir miskin jangan dengan memberinya “ikan” namun dengan jalan memberinya “kail”. Sehingga pertolongan yang ada itu akan mampu membantu yang bersangkutan untuk keluar dari kemiskinannya sendiri. Sebaliknya kalau menolong golongan miskin dengan cara konsumtif maka pertolongan itu hanya bersifat sementara, karena si miskin hanya diberi “ikan” akibatnya, ikan akan cepat habis dan ia tidak tahu bagaimana mendapatkannya.⁹ Hal ini juga pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, bahwa beliau pernah memberikan sodaqoh kepada seorang fakir sebanyak dua dirham dengan anjuran agar satu

⁸ M. Dawam Rahardjo, *Islam Dan Transformasi Sosisal Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, hal. 499

⁹ *Ibid.* Hlm. 597

dirham untuk makan dan satu dirham untuk membeli kapak untuk bekerja. Lima belas hari kemudian orang tersebut datang kepada Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ia telah berhasil bekerja dan mendapatkan sepuluh dirham.¹⁰ Dengan kata lain bahwa ternyata dengan jalan memberikan sebagian dari harta kekayaan akan sangat membantu kepada orang yang sangat membutuhkan, apalagi di negara ini yang mayoritas masyarakatnya masih banyak yang dibawah garis kemiskinan. Maka dari itu dengan jalan ini diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan dan dapat menjadi solusi yang nyata demi pemerataan sosial.

BAZDA kabupaten Magelang telah mencoba mendistribusikan zakat sebagai modal usaha dengan memberikan zakat yang tujuannya adalah supaya zakat tersebut dapat berkembang sehingga tujuan zakat dapat tercapai.¹¹

Pemberian modal usaha yang diambil dari dana zakat tidak akan dapat efektif jika tidak dapat mengukur secara akurat tingkat pencapaian keberhasilan. Mengukur secara akurat ini penting sebab BAZDA tidak dapat membantu *mustahik* secara efektif jika tidak mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai setiap *mustahiknya* dan kekurangan apa yang masih menjadi masalah bagi *mustahik*. Hal yang sama pentingnya adalah

¹⁰ M. Dawam Rahardjo, *Islam Dan Transformasi Sosisal Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, hal. 597

¹¹ Wawancara dengan Drs. Muslich M. Pd.I. (Sekretaris BAZDA kabupaten Magelang).

BAZDA tidak dapat memperbaiki jika tidak memperoleh indikasi efektifitas dalam memberikan zakat sebagai modal usaha.

Efektifitas dapat diartikan mengukur, yaitu untuk menggambarkan pengetahuan dan ketrampilan *mustahik* atau sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Alasan mengapa mengukur pencapaian: adalah sebagai umpan balik yang merupakan fungsi penting pada mengukur pencapaian. Atau dengan kata lain adalah memberikan umpan balik dengan mempertimbangkan efektifitas pemberian modal usaha. Pengetahuan pada *performance mustahik* membantu *muzakki* / BAZDA untuk mengevaluasi pembelajaran mereka dengan menunjuk area dimana pemberian modal usaha telah efektif dan area dimana *mustahik* belum dapat menggunakan pemberian dana zakat sebagai modal usaha. Informasi ini dapat digunakan untuk merencanakan pendistribusian zakat sebagai modal usaha selanjutnya dan memberikan nasehat untuk metode pendayagunaan zakat alternatif.¹²

Berangkat dari paparan ini, penulis beranggapan bahwa pembicaraan mengenai pendayagunaan zakat sebagai modal usaha sangat penting untuk dibahas baik dalam tataran konsep maupun prakteknya. Penulis mencoba untuk meneliti lebih lanjut tentang pemberian Zakat sebagai modal usaha di BAZDA kabupaten Magelang , karena di BAZDA kabupaten Magelang sendiri menerapkan pemberian zakat sebagai modal usaha dengan cara hibah, bukan dalam bentuk pinjaman.

¹² www.Members.tripod.com/putrohari/mengukur_pencapaian.htm

Dari uraian tersebut diatas penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan detail terhadap *muzaki* sehingga menumbuhkan sikap sadar yang tinggi. Selain itu praktek dalam pendayagunaan zakat sebagai modal usaha sudah tercapai apa belum, dengan tujuan hasil dari zakat tersebut benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat. Penulis akan membahas permasalahan ini dalam bentuk sebuah skripsi dengan judul “ **STUDI ANALISIS EFEKTIFITAS PEMBERIAN ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI MODAL USAHA DI BADAN AMIL ZAKAT DAERAH (BAZDA) KABUPATEN MAGELANG** ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas pembatasan masalah yang dilakukan oleh peneliti, maka rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana analisis hukum tentang pemberian zakat sebagai modal usaha?
2. Bagaimana tingkat efektifitas pemberian zakat sebagai modal usaha ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektifitas pemberian zakat sebagai modal usaha di BAZDA kabupaten Magelang. Sehingga nantinya dapat diketahui sejauh mana tingkat pencapaian dalam penerapan pemberian zakat sebagai modal usaha.

D. Telaah Pustaka

- a. Qodry Azizy dalam bukunya “*Membangun Fondasi Perekonomian Umat*” mengatakan pembagian zakat secara konsumtif diberikan kepada orang-orang miskin yang tidak mampu bekerja seperti orang cacat, orang jompo. Sedangkan mereka yang mempunyai kemungkinan untuk bekerja, lebih baik dana Zakat digunakan untuk *Training*, memberi bekal kerja mereka dan mendidik anak-anak mereka serta untuk modal kerja mereka.¹³
- b. Terdapat skripsi dengan judul “Pengelolaan Zakat Amwal Studi Analisis Terhadap Bapelurzam Cabang Weleri Kendal”, oleh Dwi Kristiono alumni Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang tahun 2006, memaparkan bagaimana pengelolaan Zakat; seperti bagaimana cara penarikan, pengelolaan dan pendistribusian zakat. Dalam penelitian tersebut belum memaparkan bagaimana tingkat efektifitasnya tentang zakat sebagai modal usaha yang dilaksanakan di Bapelurzam Cabang Weleri Kendal.

Penulis ingin meneliti bagaimana efektifitas pemberian zakat sebagai modal usaha di BAZDA kabupaten Magelang dengan maksud sebagai satu upaya pengembangan zakat sekaligus penyebarluasan pendayagunaan zakat sebagai modal usaha.

¹³ Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hal. 142

E. Metode Penelitian

Desain penelitian ini adalah sebuah penelitian lapangan atau *Field Research* yang bersifat non eksperimen. Dalam penelitian ini, kegiatan penelitian akan diarahkan untuk mendapatkan gambaran mengenai obyek yang diteliti dengan melihat langsung dilapangan atau ditempat obyek beroperasi. Sebagaimana sifat dari penelitian ini, maka dalam penelitian ini tidak mengusahakan timbulnya variable baru.

Metode dalam penelitian mempunyai peranan penting karena untuk menentukan bagaimana cara kerja dalam mekanisme penelitian sehingga akan tepat mengenai sasarannya. Untuk penelitian dalam skripsi ini penulis menggunakan metode-metode penelitian sebagai berikut :

1. Sumber Data

- a. Sumber data lapangan dengan menggunakan *field study* yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya. Ini meliputi data *intern* dan *ekstern*,¹⁴ yaitu dengan mencari data di BAZDA kabupaten Magelang sendiri dan mencari data lainnya yang masih berkaitan, seperti wawancara dengan yang diberi zakat untuk modal usaha (*mustahik*).
- b. Sumber data kepustakaan dengan menggunakan *library research*.
Yaitu penelitian kepustakaan dengan tujuan mengumpulkan data

¹⁴ Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, 1999, hal. 74

dan informasi dengan bantuan macam materi yang terdapat dalam ruang kepustakaan, misalnya berupa buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan, dokumen-dokumen, dan lain-lain.¹⁵ Yang masih memiliki korelasi yang kuat untuk mendukung atau menambah referensi dalam penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview / Wawancara

Metode ini digunakan untuk mengetahui hal-hal yang mendalam tentang pendayagunaan zakat sebagai modal usaha dari responden, dalam hal ini respondennya adalah pengelola zakat pada BAZ yang bersangkutan dan dengan penerima Zakat sebagai modal usaha (*mustahik*). Model interview yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview bebas terpimpin. Model interview bebas terpimpin adalah model interview yang dijalankan dengan pedoman interview secara garis-garis besar tentang hal-hal yang dipertanyakan.¹⁶

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan suatu obyek dengan sistematis fenomena yang diselidiki. Dalam hal ini menggunakan jenis teknik observasi non partisipan, yaitu peneliti diluar subyek

¹⁵ *Ibid.* hal. 76

¹⁶ Sukandarrumidi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002, hal. 96

yang diamati.¹⁷ Metode ini digunakan agar masalah pokok dilihat secara langsung pada BAZDA kabupaten Magelang untuk mengetahui lebih jelas realitas dana zakat sebagai modal usaha sekaligus berbagai aspek yang terkait dengannya akan diidentifikasi secara mendalam.

c. Dokumentasi

Metode ini kerap kali disebut dengan metode pengumpulan data yang berasal dari tulisan. Data yang dimaksud dapat berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan dan lain sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperdalam pemahaman akan konsep teori yang terkait dengannya berikut dengan profil badan atau lembaga yang bersangkutan.¹⁸

3. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih karena didasarkan atas desain penelitian, pendekatan penelitian serta sumber data yang digali sebagai data penelitian.

Dalam teknik deskriptif kualitatif ada tiga langkah yang meski dilakukan sebagai tahapan melakukan analisis terhadap datanya. Tahap

¹⁷ *Ibid.* hal. 69

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hal. 202

awal, adalah tahap persiapan, dalam tahap ini peneliti mempersiapkan segala sesuatu, yakni data-data yang berhasil dikumpulkan.¹⁹

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun guna memudahkan dalam penulisan dan memahami penelitian yang akan ditulis sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Yang terdiri dari latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan penulisan skripsi, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II. TINJUAN UMUM TENTANG ZAKAT

Yang memuat Pengertian Zakat, Landasan Hukum Zakat, Syarat-syarat Wajib Zakat, Tujuan Disyariatkannya Zakat, Orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*), dan Hubungan Zakat Dengan Modal Usaha.

BAB III. EFEKTIFITAS PEMBERIAN ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI MODAL USAHA DI BADAN AMIL ZAKAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

¹⁹ *Ibid.* hal. 205

Terdiri dari Gambaran Umum Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) kabupaten Magelang, Praktek penyaluran zakat produktif sebagai modal usaha.

BAB IV. ANALISIS TENTANG EFEKTIFITAS PEMBERIAN ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI MODAL USAHA DI BADAN AMIL ZAKAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Yang terdiri dari Analisis produk-produk penyaluran zakat (Muzakki), dan Analisis terhadap Efektifitas Pemberian Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha di Badan Amil Zakat Daerah kabupaten Magelang.

BAB V. PENUTUP

Yang memuat Kesimpulan, Saran-saran dan Penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

A. Pengertian Zakat

Sebelum skripsi ini membahas lebih lanjut tentang efektifitas pemberian zakat sebagai modal usaha di BAZDA kabupaten Magelang. Maka akan penulis paparkan lebih lanjut tentang beberapa pengertian zakat, yang dimaksudkan untuk mempermudah kerangka berpikir penulis dan pembaca. Pemahaman tentang zakat itu sendiri dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain sebagai berikut :

1. Zakat Ditinjau Dari Bahasa

Secara bahasa, zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti tumbuh (*Nuwuww*) dan berkembang / bertambah (*ziyadah*).¹ Sedang arti zakat pada *lughat tathhir* artinya menyucikan dan pada *ishthilah* artinya memperbaiki dan *nama'* artinya bertambah kebajikan dan barakah dan *madah* artinya puji.² Tetapi zakat juga dapat dimaknai dengan *thaharah* yang berarti bersih.³ Dan *ash-shalahu* artinya keberesan.⁴

¹ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995, hal. 82

² Muslich Shabir, *Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Tentang Zakat Suntingan Teks dan Analisis Intertekstual*, Bandung: Nuansa Aulia, 2005, hal. 29

³ Husein As-Syahatah, *Akuntansi Zakat Panduan Paraktis Penghitungan Zakat Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Progressif, 2004, hal. 5

⁴ Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hal 7

Dalam firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 103 :



Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S. At-Taubah ; 103)⁵

2. Zakat Ditinjau Dari Istilah

Menurut istilah zakat mempunyai beberapa pengertian yang dapat penulis paparkan sebagai berikut :

- a. Zakat adalah sejumlah harta (berupa uang atau benda) yang wajib dikeluarkan dari milik seseorang, untuk kepentingan kaum fakir miskin serta anggota masyarakat lainnya yang memerlukan bantuan dan berhak menerimanya.⁶
- b. Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.⁷
- c. Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Pertumbuhan dan perkembangan usaha manusia yang mendatangkan hasil dan keuntungan membawa pengaruh pula terhadap perkembangan zakat.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1996, hal. 162

⁶ Muhammad Bagir Al-Habsy, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an As-Sunnah Dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan, 2005, hal.273

⁷ Didin Hafiduddin, *Loc.cit.*

Seseorang yang memenuhi syarat-syaratnya, yaitu setiap muslim yang mempunyai kekayaan-kekayaan tertentu dan telah sampai syarat-syaratnya, seperti kekayaan itu sampai *nisabnya* dan *haul*, wajib mengeluarkan zakatnya.⁸

- d. Zakat juga berarti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (Mustahik) dengan persyaratan tertentu.⁹

Dalam Al Qur'an ada beberapa istilah yang digunakan untuk zakat yaitu *infaq* (At Taubah : 34) karena hakekatnya zakat itu penyerahan harta untuk kebajikan-kebajikan yang diperintahkan Allah. Disebut *Sadaqah* (At Taubah : 60 dan 103) karena memang salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan perintah Allah yang bersifat material atau harta benda yang harus diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan harapan dapat memperoleh kebaikan, saling kasih mengasihi dan mensucikan jiwa dari sifat kikir, kecemburuan sosial.

B. Landasan Hukum Zakat

Zakat merupakan bentuk ibadah yang mengandung dimensi sosial. Artinya, selain sebagai bentuk pengabdian seorang hamba terhadap Allah, zakat

⁸ B. Wiwoho (*eds.*), *Zakat dan Pajak*, Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 1992, hal. 32

⁹ Didin Hafiduddin, *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hal 87

menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang munkar.” (Q.S. Al-Hajj; 41)¹²

Dan masih banyak dalil-dalil Al-Qur'an yang menerangkan tentang

kewajiban untuk mengeluarkan zakat.

2. Sunnah

Landasan hukum zakat selain Al-Qur'an, juga terdapat di dalam

hadits-hadits Nabi, antara lain :

حد ثنا عبد الله بن منير : سمع يز يد العد ني : حدثنا سفيان • عن زيد بن اسلم قال : حد
ثني عياض بن عبد الله بن أبي سرح • عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كنا
نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر • أو صاعا من شعير •
أوصاعا من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال : أرى مد ا من هذا يعد ل مد
ين •

Artinya : Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudriy r.a.: Kami (kaum Muslim) memberikan zakat fitrah pada masa Nabi Saw. Berupa satu sha makanan, atau satu sha kurma, atau satu sha gandum, atau satu sha kismis (anggur kering). Ketika Muawiyah menjadi Khalifah dan harga-harga barang murah, ia berkata, “Aku berpendapat bahwa satu mud gandum dapat dijadikan imbangannya untuk dua mud biji-biji yang lain.”¹³

3. Ijma' Ulama

Sedangkan menurut ijma' para ulama zakat merupakan suatu rukun daripada segala rukun Islam yang lima. Adapun hukum mengeluarkan zakat adanya kesepakatan semua (ulama) umat islam di semua negara sepakat bahwa zakat adalah wajib bahkan para sahabat Nabi SAW. Sepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Dengan

¹² Departemen Agama RI, *Loc. cit.* hal. 269

¹³ *Shahih Bukhari*, Bandung: Pustaka Madani, 1999, hal. 106

demikian barang siapa mengingkari kefardhuan zakat berarti dia kafir atau murtad atau dianggap keluar dari Islam.¹⁴

C. Syarat-Syarat Wajib Zakat

Allah telah mewajibkan zakat kepada setiap muslim atau badan yang dimiliki oleh orang-orang Islam sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak. Dengan demikian untuk melaksanakan kewajiban tersebut diperlukan syarat-syarat bagi seorang muslim untuk mengeluarkan zakat, yaitu sebagai berikut :

وشرائط وجوب الزكاة فيها خمسة اشياء : الا سلام ، الحرية ، والملك التام ،
والنصاب ، والحول

*Artinya : Syarat wajib zakat ada lima perkara : Islam, merdeka, milik sempurna, nisab dan sempurna.*¹⁵

1. Islam

Setiap muslim wajib mengeluarkan zakat, karena itu merupakan salah satu rukun didalam rukun Islam. Sedangkan bagi orang non Islam maka itu bukan disebut dengan zakat, tetapi hanya amal sosial biasa.¹⁶

2. Merdeka

Menurut kesepakatan ulama zakat tidak wajib bagi hamba sahaya, karena hamba sahaya tidak memiliki hak milik. Hanya tuannya yang memiliki

¹⁴ Muslich Shabir, *Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Tentang Zakat Suntingan Teks dan Analisis Intertekstual*, Bandung: Nuansa Aulia, 2005, hal. 29

¹⁵ Mustofa Diebul Bighaa, *Fiqh Islam Matan Taqrieab dan Dalilnya*, Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1984, hal.135

¹⁶ Suyitno (eds.), *Anatomi Fiqh Zakat Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hal. 27

apa yang ada ditangan hambanya. Begitu juga mukatib (hamba sahaya yang dijanjikan akan dibebaskan oleh tuannya dengan cara menebus dirinya) tidak wajib mengeluarkan zakat karena kendati dia memiliki hartanya tidak milik penuh. Menurut jumhur ulama tuannyalah yang wajib mengeluarkan zakat karena dialah yang memiliki harta hambanya.¹⁷

3. Nishab

Menurut pendapat jumhur ulama harta yang wajib dikenakan zakat adalah yang telah mencapai nishab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat.¹⁸ Sehingga apabila harta tersebut belum mencapai nishab, maka tidak akan dikenakan kewajiban zakat.

4. *Al-milk at-tam* (**كُلُّهَا أَتَمَّ**) yang berarti harta itu dikuasai secara penuh dan dimiliki secara sah, diperoleh dari usaha yang halal, bekerja, warisan, atau pemberian yang sah. Harta atau kekayaan dari hasil korupsi, suap atau hasil dari perbuatan yang haram, tidak sah dan tidak akan diterima zakatnya.¹⁹

5. Haul

ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول (رواه ابو داود)

Artinya : Tidak ada zakat di dalam harta sebelum mencapai satu tahun.
(HR. Abu Dawud)²⁰

¹⁷ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995, hal. 118

¹⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hal. 24

¹⁹ Masdar Helmy, *Pedoman Praktis Memahami Zakat dan Cara Menghitungnya*, Bandung: Alma'arif, 2001, hal.17

²⁰ Hammam Nashiruddin, *Fathul Qarib*, Kudus: Menara Kudus, 1965, hal. 452

Yang dimaksud dengan *haul* adalah harta sekurang-kurangnya telah satu tahun *Qomariyah* dalam hal uang dan barang dagangan. Akan tetapi untuk tanaman dikeluarkan zakatnya saat memanennya, berlaku juga untuk harta karun (*kanz*) tapi tidak disyaratkan *haul*.²¹

6. Telah Melebihi Pokok

Yaitu kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarganya menjadi tanggungannya untuk kelangsungan hidup, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal yang wajar.²²

D. Klasifikasi Zakat

Ada dua klasifikasi zakat yang utama yakni zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah yaitu zakat berkaitan langsung dengan ibadah shaum (puasa) pada bulan Ramadhan yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, laki-laki dan perempuan, baik dewasa maupun anak-anak, serta orang yang merdeka maupun hamba sahaya. Zakat fitrah itu besarnya 1 *sha'* (takaran) atau sekitar 2,5 kg atau 3,5 liter dari jenis makanan pokok penduduk setempat seperti beras, sagu, jagung dan sebagainya.²³ Kaitannya dengan ini ada beberapa hadits yang menerangkan tentang zakat fitrah :

حدثنا يحيى بن محمد بن السكن : حدثنا محمد بن جهم : حدثنا إسماعيل بن جعفر . عن عمر بن نافع . عن أبيه . عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد و الحر . والذ

²¹ Masdar Helmy, *Ibid.* hal.18

²² *Ibid.* hal. 19

²³ *Ibid.* hal. 42

كروا لأئمتي والصغير والكبير من المسلمين • وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة •

Artinya : Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a.: Rasulullah Saw. mewajibkan membayar zakat fitrah sebanyak satu sha (satu sha = 4,1 mud = 576 gram) kurma atau satu sha gandum bagi setiap hamba sahaya dan orang merdeka, baik laki-laki, perempuan, kecil maupun besar dari kalangan kaum muslim. Rasulullah Saw. memerintahkan agar zakat fitrah diberikan (kepada orang yang berhak menerimanya) sebelum orang-orang keluar melaksanakan sholat 'Idul Fitri.²⁴

حدثنا عبد الله بن منير : سمع يزيد العدني : حدثنا سفيان • عن زيد بن اسلم قال : حدثني عياض بن عبد الله بن أبي سرح • عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر • أو صاعا من شعير • أو صاعا من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال : أرى مدًا من هذا يعدل مد ين •







Artinya : Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudriy r.a.: Kami (kaum Muslim) memberikan zakat fitrah pada masa Nabi Saw. Berupa satu sha makanan, atau satu sha kurma, atau satu sha gandum, atau satu sha kismis (anggur kering). Ketika Muawiyah menjadi Khalifah dan harga-harga barang murah, ia berkata, "Aku berpendapat bahwa satu mud gandum dapat dijadikan imbangannya untuk dua mud biji-biji yang lain."²⁵

Kategori berikutnya adalah zakat maal. Zakat ini adalah bagian dari harta seseorang atau badan hukum yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai untuk jangka waktu tertentu dan jumlah minimal tertentu pula. Kekayaan atau harta yang wajib dizakati adalah a) emas, perak dan uang, b) barang dagangan, c) binatang ternak, d) hasil bumi, hasil

²⁴ *Shahih Bukhari*, Bandung: Pustaka Madani, 1999, hal. 104

²⁵ *Ibid.*, hal. 106

laut, e) barang (hasil) temuan.²⁶ Secara terperinci akan disebutkan dalam tabel dibawah ini²⁷ :

N o	Jenis Zakat	Waktu Wajib Zakat	Nishab	Besar Zakat	Keterangan
1	 Emas  Perak  Batu permata	1 tahun 1 tahun 1 tahun	94 gram emas 94 gram emas 94 gram emas	2,5 % 2,5 % 2,5 %	Harta untuk pehiasan sehari-hari tidak dikenai zakat.
2	Binatang Ternak  Onta  Sapi  Kambing	1 tahun 1 tahun 1 tahun	5 ekor 10 ekor 15 ekor 25 ekor 36 ekor 61 ekor 30 ekor 40 ekor 40 ekor 121 ekor 201 ekor 400 ekor	1 ekor kambing 2 ekor kambing 3 ekor kambing 1 ekor anak onta 1 ekor anak onta 1 ekor anak onta 1 ekor anak sapi 1 ekor anak sapi 1 ekor kambing betina 2 ekor kambing 3 ekor kambing 4 ekor kambing	- - - Umur 1 tahun Umur >2 tahun Umur >4 tahun Umur >1 tahun Umur >2 tahun Umur >1 tahun (Dalam setiap 100 ekor kambing, 1 ekor kambing)
3	Barang dagangan	1 tahun	Senilai 94 gram emas	2,5 %	
4	Hasil Bumi, Hasil Laut,	Tiap panen	750 Kg	5 – 10 %	5% jika air susah 10% jika air mudah
5	Barang Temuan (Rikaz)	Saat itu juga	Senilai 94 gram emas	1/5 (20%)	-

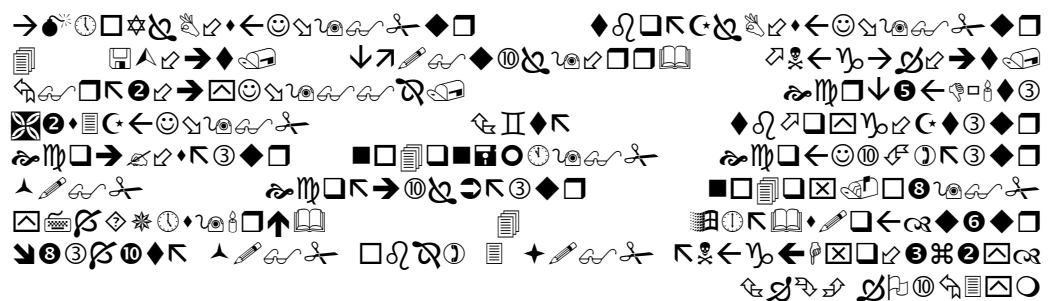
²⁶ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995, hal. 101

²⁷ Mustofa Diebul Bighaa, *Fiqh Islam Matan Taqrieab dan Dalilnya*, Jilid I, Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1984, hal.141

E. Tujuan Disyari'atkannya Zakat

Sebagaimana pengertian zakat, dalam mengeksplorasi tujuan zakat, maka akan menemukan pula banyak versi tujuan zakat yang dilahirkan oleh para ulama dan cendekiawan muslim. Namun demikian, berbagai versi yang ada ini selalu saja memiliki substansi yang sama. Tujuan zakat yang berhasil dimunculkan tersebut selalu terkait dengan dua ikatan utama yang ada dalam ajaran Islam, yakni *hablumminallah* dan *hablumminannas*. Misalnya saja, rumusan tujuan zakat antara lain bahwa zakat bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan, keamanan, dan ketentraman.²⁸

Selain itu Zakat juga dapat memperkuat tali persaudaraan dan kecintaan yang dilandasi iman kepada Allah Swt. zakat juga memadamkan kebencian dan sifat *hasad*, sehingga terwujudlah masyarakat yang saling menopang, saling menjamin, saling bersaudara dan saling mencintai sebagaimana tergambar dalam firman-Nya dalam Q.S. At-Taubah ayat 71, yang berbunyi :



Artinya : “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungka, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka

²⁸ Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hal 55

*ta'at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah”.*²⁹

F. Orang - Orang Yang Berhak Menerima Zakat (*Mustahik*)

Zakat merupakan kewajiban kepada setiap muslim baik itu laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun orang dewasa. Tetapi selain itu di dalam Al-Qur'an dengan jelas kepada siapa zakat diberikan atau siapa saja yang berhak menerima Zakat. Dalam surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi :

لَا تُزَكُّوا زَكَاتِكُمْ لَكُمْ أَوْلِيَاءُ يَتَذَكَّرُونَ أُولَئِكَ يُحَرِّمُونَ زَكَاتَكُمْ إِذَا دُمِّيْتُمْ عَلَيْهِمْ لِيُتَمَدَّ إِلَى أَهْلِ الْبَيْتِ وَآلِ الْيَتَامَىٰ وَنَحْوِهِمْ بِمَا خَصَّ بِكُم مِّنْهُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

*Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang hutang, untuk di jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana .*³⁰

Berdasarkan atas ayat 60 surat at-Taubah tersebut, ada delapan kategori orang yang berhak atas dana zakat. Kedelapan orang tersebut adalah fakir, miskin, amil zakat, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil. Di bawah ini akan didefinisikan masing-masing dari delapan kelompok tersebut :

- a. Fakir adalah kata yang dikenakan pada orang yang tidak bekerja dan meninggalkan negerinya karena takut akan penindasan untuk

²⁹ Husein As-Syahatah, *Akuntansi Zakat Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Progressif, 2004, hal. 5

³⁰ Departemen Agama RI, *Op. cit.* hal. 156

mendapatkan perlindungan di negara lain.³¹ Selain itu masuk pula dalam kategori ini orang tua yang tidak mampu. Tidak dapat memperoleh nafkah dan sedang menunaikan tugas-tugas agam islam. Sedangkan dalam kitab *Al-Umm* dijelaskan bahwa orang fakir itu adalah orang yang tiada berharta dan tiada pekerjaan yang berhasil baginya pada suatu masa. Dia itu orang meminta-minta atau orang yang tidak suka meminta-minta.³²

- b. Orang miskin adalah orang yang mempunyai harta atau pekerjaan yang berhasil baginya dan tidak mencukupi. Ia meminta-minta atau tidak memintaminta.³³ Seperti halnya orang fakir, orang yang masuk kedalam kategori orang miskin juga berhak atas zakat. *Al-Massakiin* adalah mereka yang tidak mampu memenuhi apa yang mencukupi mereka, seperti orang membutuhkan sepuluh tetapi hanya bisa mendatangkan delapan.³⁴ Kata miskin juga meliputi semua orang yang tidak berdaya atau cacat yang disebabkan sakit, usia tua atau perang dan orang yang tidak mampu melakukan pekerjaan apapun atau meskipun mampu pekerjaan namun tidak mendapatkan penghasilan yang tidak mencukupi untuk biaya diri mereka sendiri serta keluarganya.

³¹ Q.S. Al-Hasyr, ayat 8

³² Al-Imam Asy-Syafi'I, *Al-Umm (Kitab Induk)*, Jilid III, Alih bahasa oleh Ismail Yakub, Jakarta Selatan: Faizan, 1992, hal. 3

³³ *Ibid.*

³⁴ Mustofa Diebul Bighaa, *Fiqih Islam*, Jilid I, Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1984, hal. 145

- c. Amil atau para pengelola zakat adalah mereka yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengumpulkan zakat dan membagi-bagikannya.³⁵ Orang yang dimaksud adalah orang yang bertindak sebagai pengumpul, penghitung, distributor, penjaga gudang dan lain-lain yang dibutuhkan dalam pengelolaan zakat.
- d. Muallaf (*Orang-orang yang dijinakkan hati*), ialah orang-orang yang sudah atau baru masuk Islam.³⁶ Dimasukkan dalam kelompok ini adalah bermacam-macam orang yang persahabatan dan kerjasamanya dapat membantu menegakkan agama Islam. Muallaf itu ada lima macam :
- 1) Orang yang masih lemah niatnya terhadap Islam.
 - 2) Orang yang sudah kuat imannya dan ia merupakan tokoh masyarakat yang sangat disegani.
 - 3) Orang yang menjaga tapal batas.
 - 4) Orang yang memerangi / melawan orang-orang yang akan merampok harta zakat yang sedang dibawa ke sulthan.
 - 5) Orang yang mengambil zakat dari *muzakki* yang sulit diambil oleh *sa'i*.³⁷
- e. Riqab

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Al-Imam Asy-Syafi'I, *Op. Cit.*, hal. 4

³⁷ Muslich Shabir, *Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Tentang Zakat Suntingan Teks dan Analisis Intertekstual*, Bandung: Nuansa Aulia, 2005, hal. 92

Riqab adalah seorang budak yang ingin membebaskan dirinya dari perbudakan wajib diberi zakat agar ia bisa membayar uang pembebasan yang diperlukan kepada tuannya. Akan tetapi sekarang, karena perbudakan sudah tidak ada, maka kategori ini berlaku bagi orang yang terpidana yang tidak mampu membayar denda yang dibebankan kepada dirinya. Mereka dapat diibantu dengan zakat agar terjamin kebebasannya.³⁸

- f. Orang yang berhutang (*Gharim*) adalah orang-orang yang mempunyai hutang yang tidak bisa melunasi hutangnya.³⁹ *Gharim* di dalam kitab *Al-Umm* itu dibagi menjadi dua macam. *Pertama* apabila kita sempurnakan kepentingan mereka. *Kedua* Perbuatan yang baik dan tidak maksiat.⁴⁰ Mereka lemah daripada melunasinya dengan benda dan uang. Maka diberikan kepada mereka pada pembayaran hutangnya, karena kelemahan mereka.
- g. Fisabilillah, kategori asnaf ini sangat luas. Masuk dalam kategori ini segala persoalan yang digunakan untuk mempersiapkan kaum muslimin menghadapi perang suci, pengadaan fasilitas pengobatan bagi orang sakit, pendidikan bagi mereka yang tidak mampu membayar biaya pendidikan.⁴¹

³⁸ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, Bandung: Pustaka Madani, 1998, hal. 94

³⁹ Mustofa Diebul Bighaa, *Op. Cit.*

⁴⁰ Al-Imam Asy-Syafi'I, *Loc. Cit.*

⁴¹ Masdar Helmy, *Op. Cit.* hal. 48

Secara singkat kategori ini mencakup segala tindakan yang esensial dan bermanfaat untuk kemaslahatan kaum muslimin.

- h. Musafir atau Ibnu Sabil yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan walaupun dia seorang yang kaya di kampungnya. Tetapi pada dasarnya sekarang berkembang pengertian Musafir atau Ibnu Sabil yaitu termasuk yang bisa menerima zakat ialah mereka yang tinggal di asrama pelajar atau mahasiswa dari luar negeri.⁴²

⁴² *Ibid.*

BAB III

EFEKTIFITAS PEMBERIAN ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI MODAL

USAHA DI BADAN AMIL ZAKAT DAERAH (BAZDA)

KABUPATEN MAGELANG

A. GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang merupakan salah satu Badan atau Lembaga yang berada di bawah naungan Departemen Agama kabupaten Magelang. Secara umum segala sesuatu yang ada pada BAZDA kabupaten Magelang tak bisa lepas dari BAZNAS Pusat, baik latar belakang, visi, misi, produk yang ditawarkan maupun kebijakan lembaga. Sehingga, dalam pembahasan mengenai gambaran umum dari Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang terpaut juga didalamnya pembahasan mengenai BAZNAZ Pusat.

1. Latar Belakang

a. Definisi

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) kabupaten Magelang adalah Lembaga yang dibentuk pemerintah daerah kabupaten oleh Bupati atas usul dari Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten.¹ Lembaga ini bergerak dalam bidang pengelolaan zakat, infaq dan Shadaqah (ZIS)

¹ Pasal 6 ayat 2.c UU No. 38 Tahun 1999

serta dana-dana kebajikan lainnya. BAZDA sebenarnya hanya pergantian nama yang sebelumnya bernama BAZIS sebelum tahun 1998. Setelah dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999, maka pada tanggal 08 Agustus 2001 BAZIS beralih nama menjadi BAZDA dengan struktur kepengurusan yang baru.

b. Visi dan Misi

Visi : Dari dan untuk kesejahteraan umat

Misi : 1. Mengangkat kaum dhuafa dari kemiskinan.

2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.

3. Meningkatkan pelayanan sosial dan kemanusiaan.

4. Mengembangkan ekonomi umat.

c. Tujuan

Tujuan dengan berdirinya BAZDA Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :

1. Menghimpun dana zakat, infaq, shadaqah dan dana-dana kebajikan lainnya dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syari'at.
2. Mendayagunakan dana zakat, infaq, shadaqah dan dana-dana kebajikan lainnya melalui pola pemberdayaan masyarakat lemah, dengan cara langsung maupun dengan tidak langsung.

3. Melakukan pencatatan dan administrasi lainnya, serta memberikan laporan kepada lembaga-lembaga yang terkait dengan fokus kegiatan BAZDA.
4. Melakukan usaha-usaha yang menunjang usaha tersebut diatas

d. Sasaran

Untuk menerapkan kebijakan-kebijakan strategisnya, Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang kemudian menentukan sasaran dalam aktivitasnya , yakni :

1. Sasaran Jangka Pendek

- a. BAZDA kabupaten Magelang memiliki identitas diri serta mulai membenahi sarana dan prasarana, sistem manajemen serta dan organisasi.
- b. Badan Amil Zakat Daerah kabupaten Magelang dioptimalisasikan dengan cara membuat jaringan kerja seluas-luasnya (*Network*).
- c. Untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektifitas, diupayakan dengan menyusun rencana anggaran dan meng-*audit* seluruh aktivitas yang berhubungan dengan operasional.

2. Sasaran Jangka Menengah

- a. Memperluas dan mengembangkan sarana dan fasilitas, sistem manajemen yang telah ada.

- b. Merintis dan merencanakan usaha-usaha baru yang layak, berkaitan dengan misi BAZDA.

3. Sasaran Jangka Panjang

- a. Memiliki investasi dana amilin yang bertambah, melalui kegiatan penghimpunan dana-dana bergulir.
- b. Mengembangkan diri dengan membuat *parsial* melalui anak-anak kegiatan yang dibuat atau dengan menghidupkan lembaga swadaya masyarakat yang ada.

2. Struktur Kepengurusan Bazda Kabupaten Magelang

Susunan kepengurusan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) kabupaten Magelang pada tahun 2005 – 2008 adalah sebagai berikut² :

a. Dewan Pertimbangan

Ketua	: H. Ir. Singgih Sanyoto
Wakil Ketua	: KH. Ahmad Noor, LC
Sekretaris	: Nashari Sadikin
Wakil Sekretaris	: KH. Afifudin, BA.
Aggota	: KH. Makmuri Zaruqi
	Drs. H. Miftachussurur, M. Pd.I
	Drs. H. Baihaqi
	KH. Thohari Syamhari

² Dokumen BAZDA

b. Badan Pengawas

Ketua : KH. Mainanurrohman Anshori

Wakil Ketua : Drs. Suharno

Sekretaris : Drs. H. Kudaifah, M.Pd.I

Wakil Sekretaris : Jamaludin, BA

Anggota : Drs. H. Pardi Sriyono, SH.

KH. Muhroji

Drs. H. Rois Sudjimat, M.Pd.I

KH. Zainal Musthofa

Drs. Nuryahman

c. Badan Pelaksana

Ketua Umum : Drs. H. Hartono

Sekretaris : Muslih, M.Pd.I

Wakil Sekretaris : Drs. H. Haryono AQ.

Bendahara : Drs. H. Fran Suharmadji, SE.MM.

Wakil Bendahara : Drs. H. Abdul Hafidz, M.Pd.I

Seksi Pengumpulan : Drs. H. Bambang Supriyo

Drs. H. Mudjiono

Seksi Pendistribusian : Drs. H. Ngadri Budiono

Djaffar, HP

Drs. H. Muhammad Ridwan

Seksi Pendayagunaan : Letkol Inf. Rimbo KY

Kepala Polres

Seksi Pengembangan : Drs. M. Sugijono, Msi

Amran Awwaludin

3. Mekanisme Kerja Bazda Kabupaten Magelang

Dalam melaksanakan tugas sebagai amil zakat, BAZDA Kabupaten Magelang membuat program kerja setelah dilakukan pembentukan pengurus oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Magelang yang disetujui oleh Bupati Magelang. Para amil bekerja sesuai dengan bagiannya masing-masing pengurus. Sesuai dengan bagiannya masing-masing pengurus. Sesuai dengan anggaran dasar atau pedoman pelaksana BAZDA Kabupaten Magelang. Dalam melaksanakan program kerja harus sebaik-baiknya sesuai alokasi waktu yang ditetapkan. Komposisi pengurus amil zakat di BAZDA Kabupaten Magelang terdiri dari Badan Pertimbangan, Komisi Pengawas serta Badan Pelaksana.³ Mekanisme kerja masing-masing amilin dapat penulis paparkan sebagai berikut :

a. Badan Pertimbangan

Satu-satunya badan yang bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan syari'ah di dalam kegiatan operasional BAZDA. Badan ini memberikan masukan, saran dan kebijakan-kebijakan umum serta mengawasi seluruh kegiatan BAZDA.

³ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Bambang Supriyo (Seksi Pengumpulan BAZDA Kabupaten Magelang) pada tanggal 19 Mei 2008.

b. Badan Pengawas

Satu-satunya badan yang bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan manajerial di dalam operasi BAZDA. Badan ini memberikan masukan, saran dan kebijakan-kebijakan pelaksanaan manajemen operasi serta mengawasi seluruh kegiatan BAZDA dalam pengelolaannya.

c. Badan Pelaksana

Satu-satunya badan yang bertanggung jawab terhadap kebijaksanaan dalam bentuk operasional di dalam BAZDA. Badan ini juga mengusulkan perencanaan kerja, melaksanakan kebijakan umum. Badan ini lebih mengarah pada teknis pelaksanaan operasional rutin. Membuat skedul kerja rutin yang berhubungan dengan operasional BAZDA, baik penghimpunan, pendayagunaan maupun administrasinya.

Secara terperinci akan penulis paparkan mekanisme kerja masing-masing amilin di dalam badan pelaksana sebagai berikut :

- 1) Ketua Umum bertugas mengkoordinir, menghimpun koordinator di tingkat kecamatan, menyampaikan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah dibuat di tingkat kecamatan, menyampaikan pertanggung jawaban kepada Dewan Pertimbangan, Dewan Pengawas dan Kepala Departemen Agama Kabupaten Magelang.

- 2) Sekretaris I bertugas membuat undangan, mengarsipkan setiap surat yang masuk dan keluar, menata administrasi BAZDA kabupaten Magelang, menginventarisir setiap barang milik BAZDA.
- 3) Sekretaris II bertugas membantu tugas sekretaris I.
- 4) Bendahara I bertugas membuat laporan keuangan dan bertanggung jawab terhadap uang yang masuk dan keluar dari dan ke BAZDA.
- 5) Bendahara II bertugas membantu tugas bendahara I.⁴

4. Daftar Nama Muzakki (Dinas / Kantor)⁵

No.	Nama Muzakki	No	Nama Instansi
1	DPRD	101	Kelurahan Sumberejo Mertoyudan
2	SEKRETARIAT DPRD	102	Kelurahan Muntilan
3	KODIM 0705 MAGELANG	103	Kelurahan Secang
4	POLRES MAGELANG	104	DINAS PENDIDIKAN KAB. MAGELANG
5	PENGADILAN NEGERI	105	UPT Dinas Pendidikan Bandongan
6	PENGADILAN AGAMA	106	UPT Dinas Pendidikan Kaliangkrik
7	KEJAKSAAN NEGERI	107	UPT Dinas Pendidikan Windusari
8	SEKRETARIAT DAERAH	108	UPT Dinas Pendidikan Grabag
9	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	109	UPT Dinas Pendidikan Secang
10	BAPPEDA	110	UPT Dinas Pendidikan Ngablak
11	BAWASDA	111	UPT Dinas Pendidikan Pakis
12	BPKKD	112	UPT Dinas Pendidikan Tegalrejo
13	BP2KDE	113	UPT Dinas Pendidikan Candimulyo
14	BKD	114	UPT Dinas Pendidikan Mertoyudan
15	RSU SALAMAN	115	UPT Dinas Pendidikan Muntilan
16	DPU KAB. MAGELANG	116	UPT Dinas Pendidikan Mungkid
17	DINAS KESEHATAN	117	UPT Dinas Pendidikan Sawangan
18	PUSKESMAS SALAMAN 1	118	UPT Dinas Pendidikan Dukun
19	DINAS PETERNAKAN&PERIKANAN	119	UPT Dinas Pendidikan Salam
20	DINAS PERTANIAN	120	UPT Dinas Pendidikan Srumbung
21	DINAS PERTANIAN TEGALREJO	121	UPT Dinas Pendidikan Ngluwar
22	DINAS PERHUBUNGAN	122	UPT Dinas Pendidikan Salaman
23	DINAS PASAR	123	UPT Dinas Pendidikan Borobudur
24	DINAS NARKERTRANS	124	UPT Dinas Pendidikan Tempuran
25	DINAS CAPIL & KB	125	UPT Dinas Pendidikan Kajoran

⁴ Wawancara dengan Bpk. Drs. Hartono (Ketua Umum BAZDA kabupaten Magelang).
13 Maret 2008

⁵ LPJ Tahun 2006 BAZDA Kabupaten Magelang.

26	DINAS SOSPERMAS	126	MIN Krimcing Secang
27	DINAS PARIWISATA & BUDAYA	127	MIN Secang Atas
28	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	128	MIN Sumberejo MTY
29	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	129	MIN Tirta Salam
30	BAGIAN PEMERINTAHAN DESA	130	MIN Mlangen Menoreh
31	BAGIAN HUKUM	131	MIN Tegalrum Borobudur
32	BAGIAN ORGANISASI & APARAT	132	MIN Kliwonan Jogomulyo
33	BAGIAN PEREKONOMIAN	133	MTsN Kaliangkrik
34	BAGIANPEMBANGUNAN	134	MTsN Windusari
35	BAGIAN KESRA	135	MTsN Grabag
36	BAGIAN INFORMASI KOMUNIKASI	136	MTsN Ngablak
37	BAGIAN TU & SANTEL	137	MTsN Borobudur
38	BAGIAN UMUM & PROTOKOL	138	Man 1 Karet Magelang
39	KANTOR PERTAMBEN	139	MAN 2 Tegalrejo
40	KANTOR KESBANGLINMAS	140	SMAN 1 Bandongan
41	KANTOR KIPPK	141	SMAN 2 Bandongan
42	KANTOR PERINDAG KAB. MAGELANG	142	SMAN 1 Grabag
43	KANTOR SATPOL PP / TIBUM	143	SMAN 2 Grabag
44	KANTOR PELAYANAN TERPADU	144	SMAN 1 Candimulyo
45	KANTOR DEPAG	145	SMAN 1 Mertoyudan
46	KANTOR STATISTIK (BPS)	146	SMAN 1 Muntilan
47	KANTOR PERTANAHAN (BPN)	147	SMAN 1 Kota Mungkid
48	KANTOR PELAYANAN PAJAK	148	SMAN 1 Dukun
49	KANTOR PENYULUHAN PAJAK	149	SMAN 1 Ngluwar
50	KANTOR KAS NEGARA	150	SMAN 1 Salaman
51	KANTOR KPU	151	SMKN Pertanian Salam
52	KANTOR POS KOTA MUNGKID	152	SMKN Pertanian Ngablak
53	KANTOR POS MUNTILAN	153	SMPN 1 Bandongan
54	KANTOR CABANG TELKOM MUNGKID	154	SMPN 2 Bandongan
55	KANTOR CABANG TELKOM MUNTILAN	155	SMPN 1 Kaliangkrik
56	KUA Candimulyo	156	SMPN 2 Kaliangkrik
57	BPR BAPAS 69	157	SMPN 1 Windusari
58	Hindarto (Bapas 69)	158	SMPN 1 Grabag
59	Handoko Tempuran	159	SMPN 2 Grabag
60	PDAM	160	SMPN 3 Grabag
61	Pertanian Tempuran	161	SMPN 1 Secang
62	BNI Cab. Mungkid	162	SMPN 2 Secang
63	BPK RSU Muntilan	163	SMPN 3 Secang
64	BKK Tempuran	164	SMPN 1 Ngablak
65	PT. Kertas Blabak	165	SMPN 2 Ngablak
66	DIPENDA	166	SMPN 1 Pakis
67	PT. Mekar Armada Jaya	167	SMPN 2 Pakis
68	APP Tegalrejo	168	SMPN 3 Pakis
69	BAPELKES Salaman	169	SMPN 1 Tegalrejo
70	SKB Salaman	170	SMPN 2 Tegalrejo
71	Hotel Manohara	171	SMPN 1 Candimulyo
72	Golongan C	172	SMPN 2 Candimulyo
73	KORAMIL Tempuran	173	SMPN 3 Candimulyo
74	UNIT PT. TWC Borobudur	174	SMPN 1 Mertoyudan
75	PT. TWC Borobudur	175	SMPN 2 Mertoyudan
76	BBI Holtikultura Salaman	176	SMPN 3 Mertoyudan

77	BULOG 501 Mertoyudan	177	SMPN 1 Muntilan
78	Kecamatan Bandongan	178	SMPN 2 Muntilan
79	Kecamatan Kaliangkrik	179	SMPN 3 Muntilan
80	Kecamatan Windusari	180	SMPN 1 Kota Mungkid
81	Kecamatan Grabag	181	SMPN 1 Mungkid
82	Kecamatan Secang	182	SMPN 1 Sawangan
83	Kecamatan Ngablak	183	SMPN 2 Sawangan
84	Kecamatan Pakis	184	SMPN 3 Sawangan
85	Kecamatan Tegalrejo	185	SMPN 1 Dukun
86	Kecamatan Candimulyo	186	SMPN 1 Salam
87	Kecamatan Mertoyudan	187	SMPN 2 Salam
88	Kecamatan Muntilan	188	SMPN 3 Salam
89	Kecamatan Mungkid	189	SMPN 1 Srumbung
90	Kecamatan Sawangan	190	SMPN 2 Srumbung
91	Kecamatan Dukun	191	SMPN 1 Ngluwar
92	Kecamatan Salam	192	SMPN 1 Salaman
93	Kecamatan Srumbung	193	SMPN 2 Salaman
94	Kecamatan Ngluwar	194	SMPN 3 Salaman
95	Kecamatan Salaman	195	SMPN 1 Borobudur
96	Kecamatan Borobudur	196	SMPN 2 Borobudur
97	Kecamatan Tempuran	197	SMPN 1 Tempuran
98	Kecamatan Kajoran	198	SMPN 2 Tempuran
99	Kelurahan Sawitan Mungkid	199	SMPN 3 Tempuran
100	Kelurahan Mendut Mungkid	200	SMPN 1 Kajoran

5. Perkembangan Perolehan Zakat Amwal dari Tahun 2005-2006

Bulan	Tahun		
	2005 (Rp.)	2006 (Rp.)	2007 (Rp.)
Saldo / Desember	26.243.125	32.362.565	90.175.370
Januari	6.905.635	6.905.635	-
Februari	6.905.635	17.994.430	-
Maret	17.353.430	19.656.045	-
April	19.656.045	15.414.010	-
Mei	15.414.010	17.521.530	-
Juni	17.521.530	18.908.025	-
Juli	18.908.025	17.994.100	-
Agustus	16.980.455	14.392.755	-
September	14.392.755	13.631.820	-
Oktober	13.631.820	14.431.055	-
November	10.635.675	14.860.155	-
Desember	14.860.155	20.203.245	-
Jumlah	199.408.295	224.275.370	-

6. Rekapitulasi Distribusi Zakat Bazda Kabupaten Magelang dari Tahun 2005 - 2006

Tahun	Sasaran Distribusi	Jumlah Zakat	Jenis Distribusi	Keterangan
2005	1. Pembangunan gedung RA/BA	24.300.000,-	Konsumtif	5 kecamatan
	2. Insentif Ustadz/ah TPQ/MTA	2.200.000,-	Konsumtif	2 lokasi
	3. Dhuafa	16.000.000,-	Konsumtif	14 lokasi
	4. Daerah Rawan Aqidah	15.000.000,-	Konsumtif	6 lokasi
	5. Beasiswa	9.614.000,-	Konsumtif	3 lokasi (20 siswa)
	6. Tempat Ibadah	33.500.000,-	Konsumtif	15 lokasi
	7. Amil	300.000,-	Konsumtif	2 orang
		100.914.000,-		
2006	1. Bantuan modal usaha kerajinan Gantungan kunci	2.500.000,-	Produktif	1 lokasi
	2. Bantuan Modal usaha Pedagang Kecil	6.000.000,-	Produktif	2 lokasi
	3. Peternakan	55.000.000,-	Produktif	5 lokasi
	4. Home Industri	10.600.000,-	Produktif	3 lokasi
	5. Pertanian	25.000.000,-	Produktif	3 Lokasi
	6. Rental Komputer	10.000.000,-	Produktif	1 Lokasi
		109.100.000,-		

B. PRAKTEK PENYALURAN ZAKAT SEBAGAI MODAL USAHA PRODUKTIF

Pada bagian ini penulis berupaya meneliti praktek pendayagunaan zakat sebagai modal usaha produktif yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang, sehingga kita akan dapat melihat seperti apa praktek pendayagunaan zakat sebagai modal usaha di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) kabupaten Magelang.

Sejauh ini usaha mustahik yang sudah berjalan dari pemberian zakat sebagai modal usaha bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Jenis Fasilitas Pendayagunaan Zakat Yang Diberikan Atas Proyek Badan Amil Zakat Daerah
(BAZDA) Kabupaten Magelang⁶

Proyek	Pengelola	Pencairan Dana	
		Bantuan	Pinjaman
Usaha Rental Komputer	IPNU-IPPNU Borobudur	10.000.000,-	-
Koperasi Orisma	Remaja Masjid Majaksingi	9.000.000,-	-
Peternakan Sapi	Paguyuban Pedagang Kecil Dukun	10.000.000,-	15.000.000,-
Peternakan Kelinci	Kelompok Tani Tegalrejo	10.000.000,-	-
Peternakan Kambing	Kelompok Pedagang Keliling Salam	15.000.000,-	-
Perikanan	Kelompok Tani Kebonrejo	10.000.000,-	-

1. Kerangka Dasar Pendayagunaan Zakat sebagai Modal Usaha Produktif

Pendayagunaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat, khususnya mereka yang kurang bahkan tidak mempunyai akses kepada sumber daya pembangunan didorong untuk meningkatkan kemandirian dan mengembangkan perikehidupan mereka. Pada prinsipnya, masyarakat diharapkan mampu mengkaji tantangan utama dalam pembangunan mereka lalu mengajukan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah ini.

Aktifitas pendayagunaan zakat ini kemudian menjadi basis lokal, regional dan bahkan nasional. Target utama pendekatan ini adalah kelompok yang termarginalkan dalam masyarakat. Namun demikian, hal ini tidak menafikan partisipasi dari kelompok-kelompok lain.

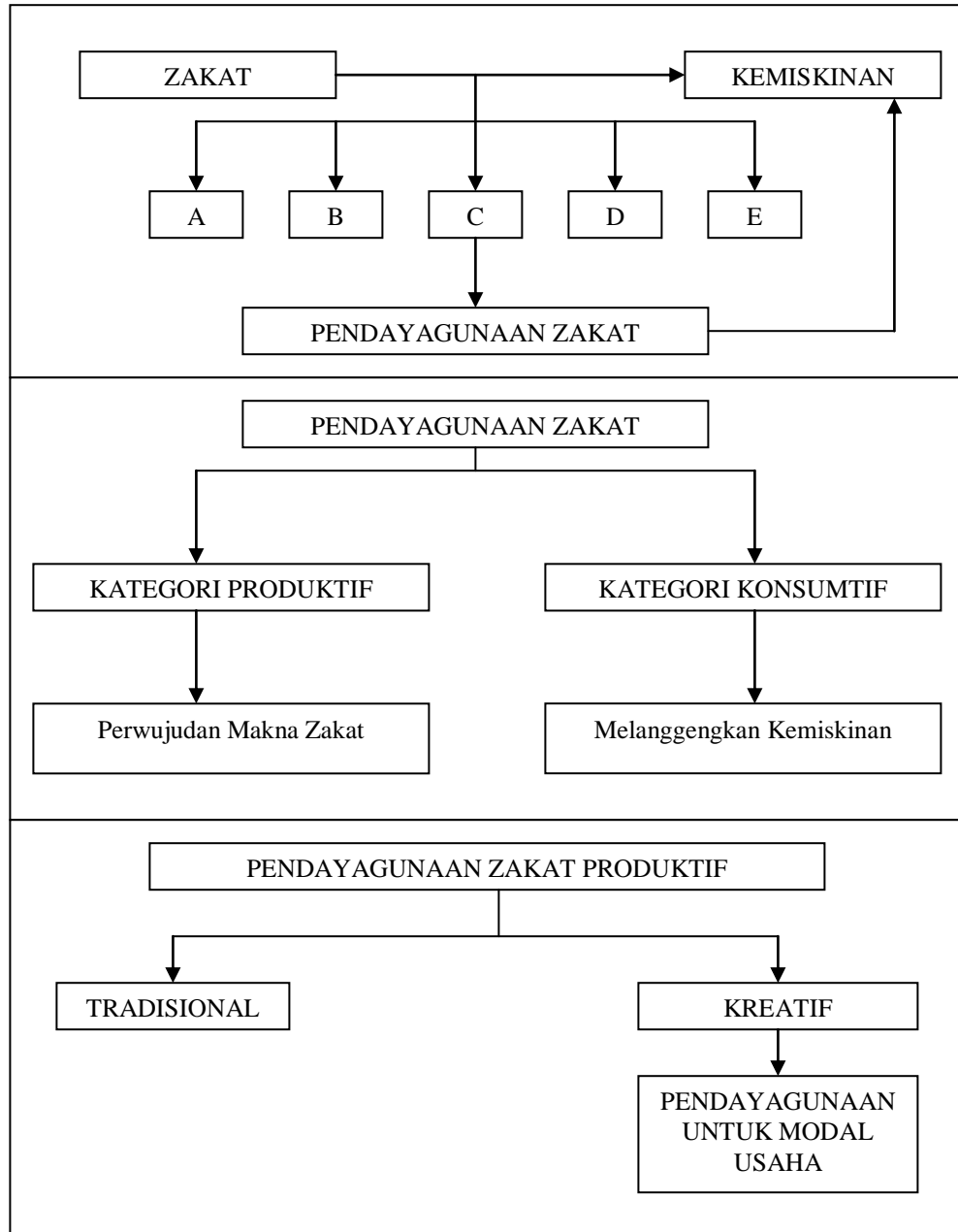
⁶ Laporan Proyek BAZDA kabupaten Magelang Tahun 2005-2006

Pendayagunaan masyarakat merupakan proses siklus yang terus menerus, proses partisipasif, dimana anggota masyarakat bekerjasama dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama. Jadi, pendayagunaan masyarakat lebih merupakan suatu proses daripada sebuah pendekatan formal saja.⁷ Hal ini dilakukan dengan mengembangkan efektifitas dan efisisensi penggunaan sumber daya pembangunan yang makin langka.

Hal yang kemudian perlu disadari dan dilakukan sebelum memulai penerapan pendekatan ini adalah menciptakan kesadaran dan meyakinkan semua pihak terkait. Aktivitas penyadaran ini khususnya dilakukan kepada mereka yang memegang posisi penting dalam manajemen dan ikut terlibat dalam pengambilan keputusan.

Disamping itu, mengingat pendayagunaan masyarakat adalah sebuah pendekatan yang relatif baru dan dibutuhkan perubahan sikap dan sikap dari semua pihak terkait yang terlibat. Maka, untuk memulai perubahan ini hendaknya dilakukan pada skala kecil. Setelah diperoleh pengalaman dan manfaat yang jelas dari pendekatan ini, maka penyebarluasannya secara lebih luas sudah bisa dimulai. Hal ini bisa dilakukan oleh organisasi yang sama dan juga pada sektor-sektor yang lain.

⁷ Wawancara dengan Bpk. Drs. Hartono (Ketua Umum BAZDA kabupaten Magelang).
Maret 2008



2. Tujuan dan Manfaat Pendayagunaan Zakat sebagai Modal Usaha Produktif

Pemilihan atas model pendayagunaan zakat dengan pendekatan pendayagunaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Secara langsung, pendekatan ini bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengenali dan memprakarsai kegiatan untuk memecahkan permasalahan yang mereka hadapi dengan menggunakan sumber daya (modal, keahlian, pengetahuan, keuangan) mereka sendiri dengan cara berkelanjutan.
- b. Meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap kesinambungan kegiatan dan program pembangunan mereka sendiri.
- c. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menilai sumber daya yang bisa mendukung kegiatan-kegiatan mereka.

Secara sederhana, pendekatan pendayagunaan zakat dengan pemberdayaan masyarakat akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengenali masalah dan kebutuhan mereka, mencari solusi dan merancang kegiatan-kegiatan yang tepat untuk mengatasi masalah dan kebutuhan ini. Selain itu, pendekatan model ini akan mempererat hubungan antar anggota dalam masyarakat itu sendiri dan masyarakat lain serta lembaga-lembaga pendukung.

3. Pola dan Bentuk Pendayagunaan Zakat Sebagai Modal Usaha

Seperti telah dijelaskan, bahwa pendayagunaan zakat sebagai modal usaha adalah pendayagunaan zakat yang dilakukan dengan memberikan “ Kail ” kepada mustahik dan bukan memberikan “ ikan “ saja. Melalui model semacam ini, arah dari pendayagunaan zakat adalah meningkatkan kemampuan individu, kelompok maupun masyarakat agar lebih mandiri dalam usahanya.

Pola pendayagunaan masyarakat harus berubah dari pola lama yang berorientasi proyek bantuan dan lebih sering bersifat kuantitatif dan eksentif serta bersifat insidental. Saat ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan masalah kualitas, intensitas dan kontinuitas kegiatan agar tujuan program benar-benar terwujud, termasuk zakat untuk modal usaha. Namun demikian, dalam pendayagunaan zakat tetap harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam al-Qur'an dan al-Hadits serta ajaran Islam tentang hal tersebut.

Agar apa yang diinginkan diatas berhasil, beberapa hal yang kemudian diperhatikan oleh Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) kabupaten Magelang ketika mengaktualisasikan pendekatan pemberdayaan tersebut adalah :

- a. Tepat Wilayah yaitu wilayah memang potensial dan berada pada tata ruang yang benar. Sedangkan yang dimaksud dengan wilayah pendayagunaan tersebut adalah lokasi tertentu dengan segala strata .

- b. Tepat target yaitu masyarakat yang betul-betul perlu diberdayakan.
- c. Tepat sasaran dan arah pembinaan sesuai dengan keluaran yang diharapkan.
- d. Tepat materi yaitu yang betul-betul dibutuhkan baik jenis, volume maupun kualitasnya.
- e. Tepat waktu artinya apa yang disampaikan tepat benar pada saat yang dibutuhkan.

Terkait dengan hal itu, bentuk program yang kemudian dikembangkan oleh Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) kabupaten Magelang adalah Program Bina Ekonomi Terpadu. Program ini adalah program pemberdayaan pengusaha lemah atau mustahik produktif dengan memberikan bantuan modal usaha yang disalurkan dengan fasilitas *Hibah, al-Qardhul Hasan, Mudharabah* serta *Musyarakah* dengan didukung juga oleh program santunan kesehatan dan pangan selama proses produksi berlangsung sampai menghasilkan sendiri.

Terhadap fasilitas yang diperuntukkan untuk pendayagunaan zakat dengan model tersebut diatas, Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) kabupaten Magelang memberikan penjelasannya sebagai berikut :

- a. Hibah

Adalah pemberian bantuan dana untuk modal usaha bagi mustahik produktif yang diberikan secara cuma-cuma tanpa harus mengembalikan dana tersebut. Hanya dengan catatan bahwa

pemberian bantuan tersebut secara berkala. Apabila pemberian bantuan pertama si *mustahik* bisa mengembangkannya, maka selanjutnya pemberian tambahan modal bisa diberikan lagi.

b. Al – Qardhul Hasan

Adalah dana pendayagunaan yang diperuntukkan untuk membiayai kebutuhan penyediaan modal usaha bagi mustahik produktif atau pengusaha lemah yang baru berkembang. Selanjutnya, penerima dana ini diwajibkan mengembalikan hanya pokok pinjamannya sesuai dengan jadwal.

c. Mudharabah dan Musyarakah

Adalah dana pendayagunaan yang diperuntukkan untuk membiayai kebutuhan penyediaan modal bagi mustahik produktif atau pengusaha lemah yang telah berkembang baik. Selanjutnya, penerima dana ini diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman dan bagi hasil dari keuntungan usaha yang diraihinya sesuai dengan nisbah dan jadwal yang disepakati.

Pengambilan dasar dalam memberikan fasilitas yang diberikan oleh BAZDA Kabupaten Magelang yaitu berdasarkan pada hadist Nabi yang artinya “*Bahwa Rasulullah telah memberikan zakat kepadanya lalu disuruhnya untuk dikembangkan dan untuk disedekahkannya lagi.*” Jadi BAZDA Kabupaten Magelang memberikan fasilitas diatas dengan tujuan untuk mengembangkan dana zakat khususnya di Kabupaten Magelang.

4. Perencanaan Sasaran Pendayagunaan Zakat Sebagai Modal Usaha

Perencanaan sasaran pendayagunaan zakat sebagai modal usaha pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang adalah lembaga swadaya masyarakat, koperasi, atau lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum atau yang memiliki misi pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat atau perorangan yang sesuai dengan ketentuan syari'ah. Adapun keseluruhan sasaran pendayagunaan tersebut adalah :

- a. Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Syari'ah (KSPS/USPS), yang kegiatan utamanya memberikan pinjaman modal bagi kebutuhan usaha anggotanya yang *mustahik* sehingga mampu hidup mandiri.
- b. Koperasi Serba Usaha (KSU) yang membutuhkan dana untuk membiayai kegiatan usahanya dalam rangka meningkatkan pendapatan anggotanya sehingga mampu hidup mandiri.
- c. Kelompok Swadaya Masyarakat yaitu Lembaga yang berbadan hukum yayasan sosial berazaskan Islam yang membutuhkan dana untuk membina *mustahik* anggotanya sehingga mampu hidup mandiri.
- d. Perorangan yaitu individu yang memenuhi kriteria sebagai *mustahik*.⁸

⁸ Wawancara dengan Bpk. Drs. Hartono (Ketua Umum BAZDA kabupaten Magelang).
Maret 2008

5. Prosedur Pendayagunaan Zakat Sebagai Modal Usaha Produktif

Prosedur adalah cara-cara yang dipakai dalam melakukan penghimpunan, pendayagunaan maupun administrasinya sehingga diperoleh kepastian standar bagi manajemen dalam melaksanakan aktivitasnya.

Kegiatan utama dari BAZDA kabupaten Magelang adalah menyalurkan kepada yang berhak menerima sesuai dengan syari'ah Islam dengan dana yang berasal dari penerimaan ZIS serta dana-dana kebajikan lainnya. Oleh karena sumber dana tersebut merupakan dana amanah yang dipercayakan oleh dermawan, maka dalam proses penghimpunan dan pendayagunaan mutlak harus memenuhi ketentuan-ketentuan didalam al-Qur'an dan al-Hadits serta ajaran Islam lainnya tentang hal tersebut.

a. Penerimaan Proposal Usaha

Tahapan penerimaan proposal merupakan tahap awal dari pendayagunaan zakat sebagai modal usaha di BAZDA kabupaten Magelang. Proposal tersebut diajukan oleh setiap pemohon kepada BAZDA kabupaten Magelang melalui Badan Pelaksana BAZDA kabupaten Magelang. Tujuan diadakannya tahap ini adalah untuk mendapatkan gambaran usaha yang akan dijalankan oleh pemohon/mustahik.

Proses pengajuan proposal dilakukan dengan menyerahkannya terlebih dahulu ke Badan pelaksana sebelum dibawa ke badan

pertimbangan. Adapun secara lengkapnya, prosedur pengajuan proposal adalah sebagai berikut :

- 1) Proposal diserahkan kepada badan pelaksana.
- 2) Dicatat pada buku Pengajuan Permohonan Baru, sedangkan yang tidak memenuhi syarat dikembalikan atau disimpan untuk dikembalikan kepada pemohon.
- 3) Identifikasi Permohonan
 - a) Proposal permohonan yang memenuhi persyaratan tersebut diklarifikasikan kembali sesuai rencana pendayagunaan, yang tidak sesuai dibuatkan surat penolakannya.
 - b) Proposal permohonan yang termasuk prioritas program kemudian dibahas dalam

b. Analisa Kelayakan Usaha Mustahik

Tahapan kedua ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan seleksi atas semua proposal usaha mustahik yang telah sesuai dengan kriteria proposal usaha BAZDA kabupaten Magelang. Seleksi ini dimaksudkan untuk menentukan apakah usaha yang diajukan oleh mustahik tersebut bisa diberikan pendanaan atau tidak.

Usaha mustahik yang berhak diberikan pendanaann adalah usaha yang memenuhi syarat dan kriteria usaha yang telah dibuat oleh BAZDA kabupaten Magelang. Sedangkan untuk usaha mustahik yang

tidak memenuhi syarat dan kriteria yang ditentukan, maka ia tidak akan diberi dana dan proposalnya akan dikembalikan lagi kepadanya.

Syarat atau ketentuan dan kriteria usaha yang akan diberikan pendanaan oleh BAZDA kabupaten Magelang adalah :

- 1) Mengandung unsur-unsur pemberdayaan, antara lain :
 - a) Program merupakan keinginan dari kelompok mustahik untuk menjadi yang lebih baik
 - b) Menggunakan dan mengakses sumber daya setempat (SDM dan SDA)
 - c) Bersifat massal, melibatkan mustahik minimal 3 orang.
- 2) Terdapat unsur peningkatan (pemberdayaan mustahik)
- 3) ada yang menguasai jenis usaha tersebut
- 4) Lebih dari satu pihak yang terlibat
- 5) Khas, kompeten dan unggul

c. Pembahasan Proposal

Aktivitas yang dilakukan pada tahapan ketiga ini adalah pembahasan tentang proposal yang telah memenuhi syarat dan ketentuan oleh Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengawas untuk menyetujui atau menolak fasilitas pendatyagunaan yang diajukan.

d. Pencairan Dana

Pada tahapan yang keempat ini, BADA kabupaten Magelang melakukan pencairan dana bagi setiap proposal usaha yang telah

disetujui oleh Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengawas. Dalam tahapan ini dilakukan dengan dua pola yaitu sebagai berikut :

1) Sekaligus

Pola pencairan ini dilakukan secara sekaligus di muka. Pola semacam ini dilakukan pada program-program yang membutuhkan dana maksimal Rp. 1.000.000,00

2) Bertahap

Pola pencairan ini dilakukan berdasarkan prioritas penggunaan dana. Pola semacam ini dilakukan untuk program-program pemberdayaan yang membutuhkan dana diatas Rp. 1.000.000,00

e. Pembinaan

Setelah dana dicairkan dan usaha dijalankan, tanggung jawab pihak BAZDA kabupaten Magelang tidak berhenti sampai disini. Namun, pihak BAZDA kabupaten Magelang kemudian harus melakukan pembinaan terhadap mustahik penerima dana tersebut.

Tahap pembinaan ini dijalankan agar dana yang telah dikucurkan serta usaha yang telah dijalankannya bisa berkembang. Sehingga mustahik yang menerima dana tersebut lambat laun bisa berubah menjadi muzakki.

f. Monitoring atau Pengawasan

Kegiatan ini dilakukan oleh pihak BAZDA kabupaten Magelang sebagai salah satu upaya untuk melakukan kontrol atas usaha yang dijalankan oleh mustahik. Hal ini penting untuk dilakukan agar usaha

yang dijalankan oleh mustahik bisa sesuai dengan perencanaanya. Sehingga kemungkinan adanya kerugian atas usaha mustahik bisa dicegah atau diminimalisir.

Metode pengawasan yang dilakukan oleh BAZDA kabupaten Magelang adalah dengan kunjungan langsung ke lapangan usaha yang berkaitan.⁹

⁹ Wawancara dengan Bpk. Drs. H. Bambang Supriyo (Seksi pengumpulan BAZDA Kabupaten Magelang). Maret 2008

BAB IV

ANALISIS TENTANG EFEKTIFITAS PEMBERIAN ZAKAT

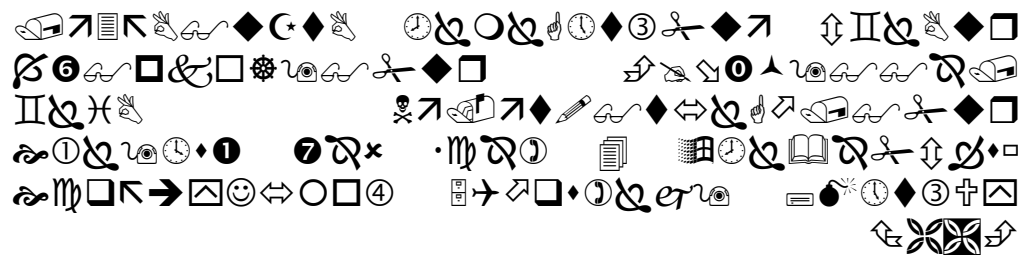
PRODUKTIF SEBAGAI MODAL USAHA DI BADAN AMIL ZAKAT

DAERAH (BAZDA) KABUPATEN MAGELANG

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang

Pendistribusian zakat sebagai modal usaha yang diberikan di BAZDA Kabupaten Magelang kalau dianalisis dari perspektif hukum Islam menjadi kajian yang sangat menarik karena merupakan gagasan dalam distribusi zakat yang masih tergolong baru. Juga karena pemberian zakat sebagai modal usaha diberikan baik secara hibah maupun dalam bentuk pinjaman tanpa bunga sehingga hal ini masih berdasarkan konsep fiqh Islam.

Secara syar'i dana zakat memang diperuntukkan kepada 8 golongan mustahik yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60. Selain itu juga terdapat dalam surat ar-Ruum ayat 23 yang berbunyi :



Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebagian dari karuniaNya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.
(QS. Ar-Ruum : 23)¹

Disinilah yang menjadi dasar dari BAZDA bahwa zakat dapat didistribusikan sebagai modal usaha yang nantinya dapat berkembang. Apabila zakat diberikan secara konsumtif maka zakat tersebut tidak dapat berkembang sehingga dana zakat akan berhenti tanpa mengalami perkembangan karena akan habis untuk sekali konsumsi dan hanya dapat dipergunakan dalam jangka waktu dekat. Secara tidak langsung dengan memberikan zakat secara konsumtif saja, maka hanya akan mendidik mustahik menjadi malas berusaha dan bekerja guna memperbaiki taraf penghidupannya.

Sistem pendistribusian zakat produktif sebagai modal usaha yang diterapkan oleh BAZDA Kabupaten Magelang dengan sistem hibah sebenarnya juga bersifat kurang mendidik, karena apabila mustahik menerima dana zakat seperti tidak mempunyai tanggung jawab mustahik terhadap dana yang diberikan dikarenakan mustahik terkadang menyalahgunakan dana yang diberikan dikarenakan mustahik terkadang menyalahgunakan dana yang diberikan bukan untuk modal usaha tetapi malah untuk membeli kebutuhan hidup mereka, bukan digunakan untuk membuka usaha buat mereka. Selain

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1996, hal. 421

itu juga karena mustahik merasa diberikan secara cumacuma tanpa ada pengembalian modal usaha yang diberikan. Tetapi apabila dana zakat diberikan dengan sistem pinjaman secara tidak langsung maka akan mendidik mustahik untuk lebih bertanggung jawab karena dengan sistem pinjaman mustahik merasa mempunyai kewajiban untuk mengembalikan dana yang telah diperolennya. Juga akan meningkatkan serta mendorong mustahik untuk meningkatkan pinjaman.

Distribusi zakat yang baik jika ada unsur pendidikannya dan didasarkan pada prinsip swadaya untuk mencapai kemandirian. Targetnya adalah untuk menjadikannya seorang mustahik menjadi seorang muzakki baru. Kesejahteraan umat dapat digerakkan dan dipacu dengan bergulirnya dana yang dimanfaatkan oleh mustahik untuk berproduksi.

Dengan metode pemberian zakat produktif sebagai modal usaha oleh BAZDA Kabupaten Magelang diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan umat. Setelah para mustahik dapat berusaha serta mendapatkan penghasilan setelah mendapatkan bantuan modal usaha, mustahik tersebut dapat hidup dengan layak. Segala kebutuhan hidup bagi diri dan keluarganya dapat tercukupi.

Di dalam permasalahan zakat terdapat ruang bagi umat Islam untuk melakukan *ijtihad*, seiring dengan perubahan ruang dan waktu. Hukum Islam mempunyai kemampuan untuk berkembang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan. Hukum islam dalam gerakannya mempunyai kaedah asasiyah

yaitu ijtihad. Ijtihad yang akan menjawab segala tantangan zaman, dapat memenuhi harapan zaman dengan tetap memelihara kepribadian dan nilai-nilai dasarnya.² Hukum Islam mudah, jauh dari sulit dan sempit, mudah diamalkan, jauh dari kepicikan, segala hukumnya dapat berjalan seiring fitrah manusia, hukum Islam tidaklah sempit melainkan dia luas. Seperti kaedah berikut :

ما ضاق شيء الا توسع

*"Tidaklah sempit melainkan dia menjadi luas"*³

Itu berarti penyempurnaan konsep hukum, selalu melibatkan ruang dan waktu yang ada di masyarakat.

Dengan metode pemberian zakat yang dilakukan BAZDA Kabupaten Magelang sebagai modal usaha untuk dimanfaatkan serta digilirkan pada mustahik lain akan lebih banyak membawa manfaat untuk dapat mencapai tujuan zakat. Dengan sistem ini akan mendatangkan kemaslahatan umum karena semakin banyak mustahik yang tertolong dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan usahanya sendiri tanpa terus tergantung zakat. Manfaat yang didapat dengan sistem ini jelas dapat membantu dalam berproduksi sehingga perekonomian mustahik dapat terangkat. Karena sesungguhnya zakat bukan pemberian sesuap atau dua suap nasi, sehari atau dua hari, kemudian para

² Hasby Ash Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, hal. 95

³ *Ibid.*, hal. 106

mustahik menjadi miskin lagi akan tetapi kebutuhan hidup secara lebih baik dan dalam kurun waktu yang relatif lama.

Dasar yang menjadi istinbath hukum pemberian zakat sebagai modal usaha di BAZDA Kabupaten Magelang yaitu dengan *masalah mursalah*.⁴ Pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak. Syarat-syarat *masalah mursalah* dapat dijadikan landasan hukum yaitu :

1. Kemaslahatan yang hakiki dan bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan saja. Dari syarat ini dapat dilihat bahwa pemberian zakat produktif sebagai modal usaha dengan harapan bahwa dana zakat tersebut tidak hanya berhenti sesaat. Tetapi dapat dikembangkan, sehingga yang tadinya seorang mustahik dapat menjadi seorang muzakki.
2. Bahwa kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan nash atau ijma'. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara'. Tidak lain hal dengan dana zakat digunakan sebagai pinjaman menurut Didin Hafiduddin membolehkannya dengan alasan pernah terjadi seorang sahabat meminjamkan seekor ternak kepada *baitul mal* lalu mengembalikannya dengan seekor ternak yang lebih baik dari yang ia pinjam.

⁴ Secara bahasa masalah mursalah yaitu yang mutlak, menurut istilah ahli fiqh, masalah adalah suatu kemaslahatan dimana syar'i tidak mensyari'atkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan atau pembatalannya. Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Oleh : Muhammad Zuhry dan A. Qorib "Ilmu Ushul Fiqh", Semarang: Dina Utama, 1994, hal. 116

Jadi dengan dasar hukum inilah BAZDA Kabupaten Magelang berani memberikan dana zakat sebagai modal usaha. Yang tidak lain bertujuan untuk mengembangkan dana zakat agar tidak hanya sebagai penggembira saja yang hanya bersifat sementara. Tetapi dana tersebut dapat bergulir dan dapat dijadikan sebagai motor atau penggerak untuk perekonomian umat.

Persoalan yang masih mengganjal yaitu yang berkaitan dengan hukum fiqh mengenai hukum pemberian zakat sebagai modal usaha dengan sistem bagi hasil maupun pinjaman tanpa bunga. Karena itu diperlukan suatu landasan hukum yang kuat seperti hasil Mukhtamar ataupun Bahtsul Masail oleh para ulama atau seperti fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) atau keputusan Menteri Agama. Sehingga penerapan pemberian zakat semacam ini dapat dilaksanakan oleh BAZ atau LAZ di Indonesia.

B. Analisis Terhadap Efektifitas Pemberian Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Di Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Magelang

Peran dan fungsi amil sangat menentukan dalam keberhasilan pengelolaan zakat yang meliputi penghimpunan/penarikan, pengelolaan, pendistribusian zakat, pelaporan dan pencatatan. Dalam hal ini jika amil melakukan kesalahan dalam kerjanya seperti tidak amanah, tidak profesional dan tidak transparan sehingga dapat mengurangi syarat ini ercayaan masyarakat tersebut sudah hilang, sehingga eksistensi amil pun akan hilang, karena tidak ada lagi muzakki yang mau menyalurkan zakatnya ke amil

tersebut. BAZDA kabupaten Magelang di bawah naungan Departemen Agama Kabupaten Magelang sebagai amil zakat memiliki wewenang dalam pendistribusiannya. Sebelum pendistribusian zakat didahului dengan rapat pleno pra pentasyarufan yang dihadiri oleh Badan Pengawas, Badan Pertimbangan dan Badan Pelaksana. Dengan mengacu pada kebijakan BAZDA Kabupaten Magelang dalam petasyarufan agar tepat guna dan tepat sasaran. BAZDA kabupaten Magelang dalam pendistribusian zakat untuk kategori konsumtif adalah sebesar 50% dan untuk kategori produktif adalah 50%. Tetapi dalam pelaksanaannya BAZDA kabupaten Magelang kurang maksimal dalam pendistribusian zakat untuk kategori produktif. Hal ini terbukti dalam pendistribusian untuk modal usaha belum terlihat hasilnya.

Sistem pembagian zakat di BAZDA Kabupaten Magelang pendistribusian dalam dua bentuk yaitu konsumtif dan produktif (modal usaha). Pembagian zakat secara konsumtif sebenarnya tidak akan banyak membuahkan hasil karena zakat akan habis dalam waktu singkat sehingga dana zakat tidak dapat berkembang. Sedangkan pembagian zakat secara produktif (modal usaha) selain dapat mengembangkan dana zakat, juga dapat melatih jiwa wirausaha atau dengan kata lain akan memunculkan jiwa kreatifitas *mustahik* dalam mengembangkan usaha yang digelutinya sehingga dana zakat yang diberikan akan bergulir dengan tujuan bahwa seorang *mustahik* nantinya akan bisa beralih menjadi seorang *muzakki*.

Sebagian besar dana yang diarahkan ke kategori konsumtif seharusnya dikurangi, sehingga anggaran untuk zakat produktif sedikit lebih banyak. Karena distribusi untuk konsumtif hanya bisa memenuhi kebutuhan sesaat, terkadang juga malah membuat ketergantungan para mustahik terhadap dana zakat, sehingga mereka (mustahik) tidak terdorong untuk berupaya mengembangkan diri dalam berusaha karena mereka hanya tinggal menunggu hasil tanpa ada usaha dari diri mereka sendiri. Tetapi apabila distribusi dana untuk zakat produktif lebih diperbanyak maka secara tidak langsung juga akan dapat membantu banyak para mustahik untuk dapat berusaha mandiri sehingga bisa lepas dari kemiskinan dan bisa mengurangi angka pengangguran, selain itu juga mereka (mustahik) dapat memenuhi kebutuhan hidup sendiri dan keluarganya. Karena dengan pemberian zakat secara produktif (modal usaha), maka zakat yang diberikan dapat bergulir dan dapat membantu dalam mengembangkan perekonomian mereka. BAZDA juga harus lebih jeli dalam menyeleksi para mustahik yang akan diberikan zakat baik secara konsumtif maupun produktif, tidak hanya berdasarkan laporan yang diserahkan ke BAZDA saja, tetapi harus adanya dukungan data yang benar-benar nyata dilapangan.

Sebenarnya, BAZDA Kabupaten Magelang dalam merumuskan praktek pemberian zakat produktif sebagai modal usaha sudah sesuai dengan prosedur dalam pendistribusian zakat untuk usaha produktif yang terdapat dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 Tahun 1999

Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 29, yaitu :

1. Melakukan studi kelayakan,
2. Menetapkan jenis usaha produktif,
3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan,
4. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan,
5. Mengadakan evaluasi,
6. Membuat laporan.

Menurut penulis jika Pasal 29 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat tersebut dilaksanakan maka pelaksanaan usaha produktif dapat berjalan maksimal. Serta pelanggaran-pelanggaran / penyelewengan dana zakat tidak akan terjadi atau bisa diminimalisir seperti halnya dana zakat yang seharusnya untuk modal usaha digunakan untuk membelanjakan kebutuhan sehari-hari, atau malah untuk membayar hutang. Karena dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Tahun 1999 pasal 29 tersebut ada ikatan yang mengikat antara pemberi modal (BAZDA) dan penerima modal usaha (Mustahik) berupa bimbingan, penyuluhan, pemantauan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan. Sehingga antara penerima bantuan modal dari dana zakat produktif dan pemberi modal, dalam hal ini BAZDA masih ada ikatan dan berjalan bersama-sama untuk mewujudkan tercapainya usaha yang dilakukan oleh para mustahik.

Pendistribusian zakat oleh BAZDA Kabupaten Magelang sebagai modal usaha, menurut penulis juga perlu adanya program keterampilan bagi para mustahik yang tepat dengan kemampuan bakat para mustahik sebagai bekal para mustahik dalam mengelola dana bantuan zakat sebagai modal usaha, BAZDA bisa bekerjasama dengan Departemen-departemen dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Magelang yang terkait, semisal Departemen Pertanian, Depurtemen Ketenaga Kerjaan, Usaha Kecil dan Menengah, atau bisa juga dengan mengundang para pengusaha-pengusaha yang telah berhasil dalam usahanya untuk memberikan bekal serta pengalaman berusaha mereka. Sehingga, ketika seorang mustahik yang akan menerima bantuan modal usaha tidak bingung dalam penggunaannya. Karena dengan adanya pelatihan tersebut dapat menambah daya kreatifitas serta penumbuhan jiwa wirausaha dalam jiwa mustahik. Dengan demikian maka para mustahik akan langsung bisa memanfaatkan dana yang telah diberikan oleh BAZDA Kabupaten Magelang.

Tetapi dalam pelaksanaannya BAZDA kabupaten Magelang kurang maksimal dalam pendistribusian zakat untuk kategori produktif. Hal ini terbukti dalam pendistribusian untuk modal usaha belum terlihat hasilnya. Menurut penulis hal ini disebabkan selain karena manajemen didalam BAZDA sendiri belum rapi juga dikarenakan kurangnya penanganan dan pembinaan untuk kategori produktif, karena sampai saat ini usaha-usaha yang

dijalankan oleh mustahik dari pemberian zakat belum mengalami perkembangan.

Selain memberikan pembinaan terhadap mustahik, BAZDA juga seharusnya selalu memonitor perkembangan usaha yang dijalankan oleh para penerima zakat/ mustahik. Jadi nantinya akan diperoleh dimana tingkat efektifitas pemberian zakat sebagai modal usaha. Dimana BAZDA dapat mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha yang dijalankan. Seperti halnya, kesulitan – kesulitan yang dialami oleh mustahik dalam menjalankan usahannya. Sehingga BAZDA dapat membantu mencari pemecahan terhadap persoalan-persoalan yang terjadi dilapangan.

Menurut penulis , bahwa selama ini mekanisme yang dilakukan oleh BAZDA kabupaten Magelang terhadap usaha para mustahik yang mendapatkan dana hanya sebatas memberikan saja, belum adanya monitoring maupun pembinaan terhadap mustahik.. Sehingga BAZDA tidak akan dapat memperoleh indikasi efektifitas dalam memberikan zakat sebagai modal usaha. Sehingga tingkat efektifitas dalam pemberian zakat produktif sebagai modal usaha yang dillaksanakan di dalam BAZDA Kabupaten Magelang selama ini belum tercapai secara maksimal. Masih perlu adanya pembenahan-pembenahan dalam praktek pemberian zakat produktif sebagai modal usaha di dalam BAZDA Kabupaten Magelang.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari analisis dan pembahasan di bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang efektifitas pemberian zakat produktif sebagai modal usaha di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) kabupaten Magelang. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang menerapkan pendekatan pendayagunaan zakat dengan pemberdayaan masyarakat karena akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengenali masalah dan kebutuhan mereka, mencari solusi dan merancang kegiatan-kegiatan yang tepat untuk mengatasi masalah dan kebutuhan ini. Selain itu, pendekatan model ini akan mempererat hubungan antar anggota dalam masyarakat itu sendiri dan masyarakat lain serta lembaga-lembaga pendukung.
2. Bentuk pendayagunaan zakat di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang terimplementasikan kedalam program Bina Ekonomi Terpadu, yaitu dengan menerapkan pendayagunaan zakat sebagai modal usaha bagi para mustahik. Ide dasar pendayagunaan tersebut adalah ketika menolong mustahik maka jangan diberi “ikan”, namun diberi “kail” agar mustahik tahu bagaimana cara mencari ikan.

3. Mekanisme yang dilakukan oleh BAZDA kabupaten Magelang terhadap usaha para mustahik yang mendapatkan dana hanya sebatas memberikan saja, belum adanya monitoring maupun pembinaan terhadap mustahik. Sehingga tingkat efektifitas dalam pemberian zakat produktif sebagai modal usaha yang dilaksanakan di dalam BAZDA Kabupaten Magelang selama ini belum tercapai secara maksimal.

B. SARAN-SARAN

Berdasar atas keseluruhan data yang berhasil eksplorasi oleh penyusun dan segenap kemampuan yang dimiliki oleh penyusun, maka beberapa hal yang bila penyusun berikan sebagai sumbangan pemikiran atas pelaksanaan pendayagunaan zakat sebagai modal usaha pada pihak-pihak yang terkait dengannya adalah :

1. Pendayagunaan zakat sebagai modal usaha merupakan satu pilihan bentuk pendayagunaan zakat yang akan mampu menjadikan zakat sebagai salah satu cara untuk memberantas kemiskinan di Indonesia, yakni dengan ideologi pemberdayaan mustahiknya. Karena itu, disarankan kepada Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ) yang belum melaksanakan hal ini untuk segera menjalankannya. Namun demikian, penyiapan segala sesuatu yang terkait dengannya mesti dilakukan secara profesional dan transparan.
2. Terhadap praktek pendayagunaan zakat sebagai modal usaha di BAZDA Kabupaten Magelang sudah relatif baik. Namun demikian ada beberapa

hal yang perlu dicermati dan disempurnakan lagi. Hal yang dimaksud adalah :

- a. Bahwa selama ini mekanisme yang dilakukan oleh BAZDA Kabupaten Magelang terhadap usaha para mustahik yang mendapatkan dana hanya sebatas pemberian dana saja. Karena itu disarankan agar perlu dikembangkan lagi dengan pendampingan dan pembinaan. Selain itu BAZDA juga ikut menjadi pemilik usahanya sebagaimana yang dijalankan. Sehingga, dana zakat yang berhasil dikucurkan akan lebih terjaga dan *ekskalasi* mustahik menjadi muzakki akan lebih cepat lagi.
- b. Selama ini pemilihan area pemberdayaan hanya pada masyarakat daerah pedesaan saja. Karena itu, disarankan agar masyarakat di daerah perkotaan Daerah Istimewa Yogyakarta juga diberdayakan. Misalnya, para gelandangan yang ada di perempatan-perempatan jalan, yang tidur Terminal Bis Magelang dengan kuantitas yang relatif banyak.
- c. Perlunya pengembangan mekanisme pembinaan, seperti mengadakan kunjungan sebulan sekali ke tempat usaha mustahik, atau bahkan satu minggu sekali. Hal ini penting, disebabkan peran partisipatif BAZDA atau pendamping sangat mempengaruhi akan kelancaran usaha mustahik. Misalnya saja, dalam marketing, pembukuannya dan lain sebagainya.

- d. Pendistribusian zakat produktif sebagai modal usaha di BAZDA Kabupaten Magelang hendaknya tidak hanya untuk modal melainkan perlu dianggarkan untuk pelatihan, trainig kewirausahaan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha dan kreatif dalam jiwa mustahik.

C. PENUTUP

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Akhirnya hanya dengan Ridha dan Hidayah dari Allah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Habsy, Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an As-Sunnah Dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan, 2005.
- Al Khusaeni, Abu Baqir Ibnu Muhammad, *Kifayatul Akhyar Juz I*, Surabaya: t.th.
- Al-Zuhayly, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995, hal. 82
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- As-Syahatah, Husein, *Akuntansi Zakat Panduan Paraktis Penghitungan Zakat Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Progressif.
- Azizy, Qodri, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- B. Wiwoho (eds.), *Zakat dan Pajak*, Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1992, hal. 32
- Deli, M. B. Ali T., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Bandung: Penabur Ilmu, 2000
- Departemen Agama RI, *AlQur'an al-Karim dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1996.
- Departemen Dalam Negeri RI, *Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Pdf – [http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar Provinsi Indonesia menurut jumlah penduduk](http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Provinsi_Indonesia_menurut_jumlah_penduduk) –*
- Diebul Bighaa, Mustofa, *Fiqh Islam Matan Taqrieab dan Dalilnya*, Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1984.
- Hafiduddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- _____, *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Hasan, Ali, *Zakat Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Ibrahim, Yasin al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, Bandung: Pustaka Madani, 1998.

Imam Abi Abdillah Muhammad, *Shahih Bukhori Juz II*, Semarang: Toha Putra, t.th,

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.

Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hal. 46 Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.

Muslich Shabir, *Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Tentang Zakat Suntingan Teks dan Analisis Intertekstual*, Bandung: Nuansa Aulia, 2005, hal. 29

Nashiruddin, Hammam, *Fathul Qarib*, Kudus: Menara Kudus, 1965

Rahardjo, Dawam, *Islam Dan Transformasi Sosisal Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, 1999.

Sukandarrumidi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002.

Suyitno (eds.), *Anatomi Fiqh Zakat Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

www.members.tripod.com/putrohari/mengukur_pencapaian.htm

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhamad Zudi Syarif

Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 30 Agustus 1982

Alamat : Jl. Bhanu, Rt 03 /01 Brojonalan Wanurejo Borobudur
Magelang Jawa Tengah 56553

Agama : Islam

PENDIDIKAN FORMAL :

- ❖ 1988 – 1994 (SD Negeri 1 Wanurejo Borobudur Magelang)
- ❖ 1994 – 1998 (SLTP Negeri 1 Borobudur Magelang)
- ❖ 1998 – 2001 (SMU Negeri 1 Kota Mungkid Magelang)
- ❖ 2001 – 2008 (Fakultas Syaria'ah IAIN Walisongo Semarang)

Semarang, 31 Juli 2008

Muhamad Zudi Syarif